



LAPORAN KINERJA 2018

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikemas secara teknis.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja ini.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini dan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Semoga dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Dr.Ir. SRI PURYONO KS.,MP

Pembina Utama

NIP. 19600229 198603 1 004



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran umum organisasi meliputi :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi.
2. Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana.

A. 1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif.
3. Susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, membawahkan :

a) Bagian Pemerintahan, membawahkan :

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.
- (2) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan.
- (3) Sub Bagian Fasilitas Penataan Wilayah.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :

- (1) Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal.



(2) Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

(3) Sub Bagian Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c) Bagian Kerjasama, membawahkan:

(1) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

(2) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.

(3) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

2) Biro Hukum, membawahkan :

a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan:

(1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur.

(3) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.

b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :

(1) Sub Bagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum.

(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan :

(1) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I.

(2) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II.

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.

3) Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Keagamaan, membawahkan:

(1) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan perpustakaan.

(2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga.

(3) Sub Bagian Keagamaan.

b) Bagian Kesehatan, Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:

(1) Sub Bagian Kesehatan.

(2) Sub Bagian Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.



- c) Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (2) Sub Bagian pemberdayaan masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - (3) Sub Bagian Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.

c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan :

1) Biro Perekonomian, membawahkan :

- a) Bagian Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan.
 - (1) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan.
 - (2) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro.
- b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan :
 - (1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan.
 - (2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Jasa Dan Produksi;
- c) Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata., membawahkan :
 - (1) Subbagian Perhubungan.
 - (2) Subbagian Penanaman Modal dan Pariwisata.

2) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, membawahkan :

- a) Bagian Infrastruktur.
 - (1) Subbagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
 - (2) Subbagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro.
- b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - (1) Subbagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - (2) Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

3) Biro Administrasi Pembangunan Daerah, membawahkan :

- a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :



- (1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rumpun Ekonomi
 - (2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rumpun Pemerintahan, Sosial Dan Budaya
 - (3) Subbagian Pengendalian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
- b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.
- (1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I.
 - (2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro.
- c) Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.
- Subbagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Rumpun Ekonomi.
- (1) Subbagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
 - (2) Subbagian Administrasi Perencanaan dan Penganggaran.

d. Asisten Administrasi, membawahkan :

1) Biro Organisasi, membawahkan :

- a) Bagian Kelembagaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah.
 - (2) Sub Bagian pembinaan dan pengawasan Kelembagaan kabupaten/Kota.
 - (3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
- b) Bagian Kinerja Aparatur Perintah Daerah, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
 - (2) Sub Bagian Reformasi Birokrasi.
 - (3) Sub Bagian kepegawaian.
- c) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan.
 - (2) Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik.
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.



2) Biro Umum, membawahkan :

- a) Bagian Rumah Tangga SETDA, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
 - (2) Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga.
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
- b) Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Protokol.
 - (2) Sub Bagian Tata Persuratan, kearsipan dan perpustakaan.
 - (3) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
- c) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Gubernur.
 - (2) Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Wakil Gubernur.
 - (3) Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan.
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- d) Bagian Protokol, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Acara Protokoler.
 - (2) Sub Bagian Pelayanan Tamu.
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha SEKDA.

A.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas, dukungan dari sumberdaya tersebut antara lain :

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 562 pegawai **(data pada 31 Desember 2018 tanpa Biro Administrasi Pengadaan Barang jasa)** dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan golongan kepangkatan dan jabatan sebagaimana tabel berikut :



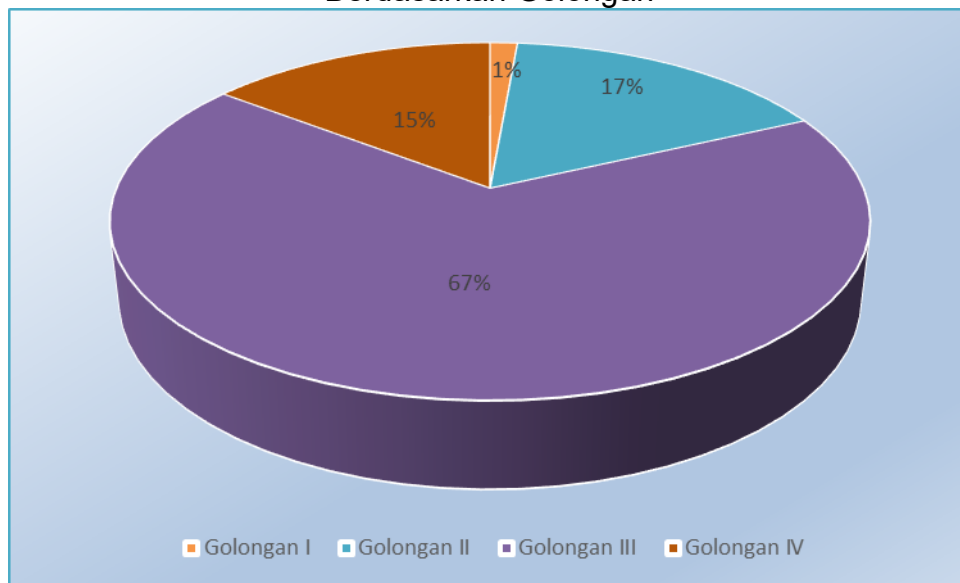
Tabel 1.1
Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan Januari Tahun 2018

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN							GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	JML	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	JML
1	Sekretaris Daerah	1		1						1	1				1	1				1
2	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	0		0						0										
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1		1						1					1		1			1
4	Asisten Administrasi	1		1						1					1		1			1
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	24	30	54	0	1	5	0	27	21		0	3	40	11	0	1	3	8	12
6	Biro Hukum	27	15	42	1	0	3	3	21	14		0	2	31	9	0	1	3	9	13
7	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	11	27	38	1	0	4	1	18	14		0	1	30	7	0	1	2	9	12
8	Biro Perekonomian	26	16	42	0	0	6	2	20	14		0	4	28	10	0	1	3	6	10
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	23	42	1	0	5	3	15	17		0	2	31	9	0	1	3	7	11
10	Biro Kesra	24	22	46	0	0	1	2	28	15		0	2	35	9	0	1	3	8	11
11	Biro Organisasi	29	25	54	0	0	6	2	28	18		0	2	39	13	0	1	3	10	14
12	Biro Umum	151	91	243	13	20	97	15	84	13		8	80	151	3	0	1	2	11	14
JUMLAH		313	249	562		21	127	28	241	128	1	8	96	387	74	1	10	22	68	97



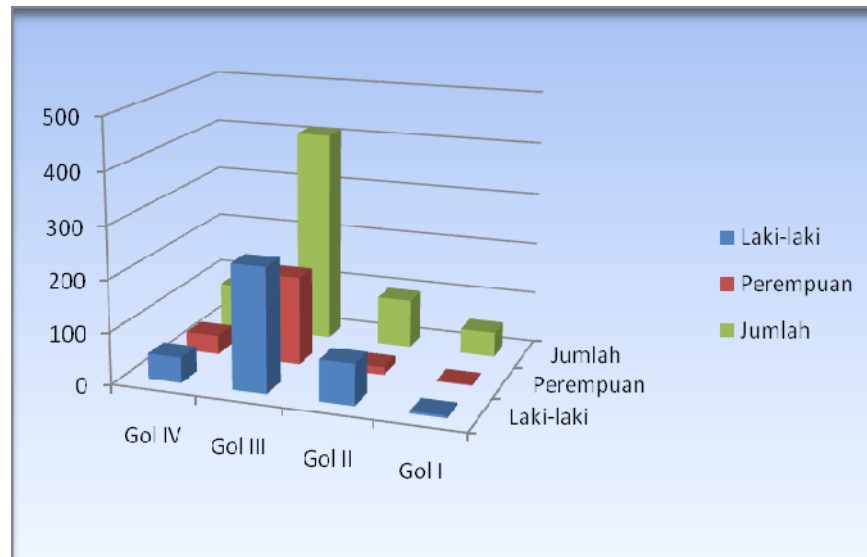
Adapun 562 pegawai dengan komposisi berdasarkan Golongan yaitu Golongan I sebanyak 8 orang, dan untuk golongan II sebanyak 96 orang, untuk Golongan III sebanyak 387 orang serta untuk Golongan IV sebanyak 84 orang, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Diagram 1.1
Komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
Berdasarkan Golongan



Tabel tersebut dapat ditampilkan dalam diagram sebagai berikut :

Diagram 1.2
**Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan
Berdasarkan Jenis Kelamin**



2. Sarana dan Prasarana :

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2.1
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	01.01	TANAH	18
2	02.02	ALAT-ALAT BESAR	39
3	02.03	ALAT-ALAT ANGKUT	327
4	02.04	ALAT-ALAT BENGKEL	2
5	02.05	ALAT-ALAT PERTANIAN	-



6	02.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	19.268
7	02.07	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	2.057
8	02.08	ALAT KEDOKTERAN	46
9	02.09	ALAT LABORATORIUM	-
10	02.10	ALAT KEAMANAN	10
11	03.11	BANGUNAN GEDUNG	44
12	03.12	BANGUNAN MONUMEN	-
13	04.13	JALAN DAN JEMBATAN	-
14	04.14	BANGUNAN AIR IRIGASI	-
15	04.15	INSTALASI	58
16	04.16	JARINGAN	-
17	05.17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	14.084
18	05.18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	73
19	05.19	HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	-
20	06.11	BANGUNAN GEDUNG	-
21	06.12	BANGUNAN MONUMEN	-

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2018

B. FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Tugas, pokok dan Fungsi Sekretaris daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, badan perencanaan daerah, inspektorat, lembaga teknis daerah, Satpol PP dan lembaga lain daerah;
- pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara singkat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya,



tema : *Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan Lembaga Lain Daerah.*

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH.

Adapun permasalahan utama Sekretariat daerah yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan di bidang kesekretariatan secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- 1). Belum optimalnya harmonisasi dan sinergitas hubungan kerja fungsional antar strata pemerintahan, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang pemerintahan umum daerah, desa Kelurahan, dan kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban serta administrasi penataan wilayah.
- 2). Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dan kerja sama, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah kerja sama baik dalam dan luar negeri.
- 3). Belum optimalnya koordinasi tertib administrasi bidang hukum, dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang perancangan dan penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah dan Kab/kota.
- 4). Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi tertib administrasi pembangunan daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang pengendalain administrasi pelaksanaan administrasi pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
- 5). Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang peningkatan dan pengembangan



perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan BUMD.

- 6). Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berpedoman pada RKO yang telah ditetapkan.
- 7). Dalam hal penyusunan LKPJ Gubernur Jateng, terkendala dengan sinkronisasi dan penyelarasan data dari masing-masing SKPD terkait pelaksanaan program & kegiatan yang dilaksanakan sesuai RKPD tahun berjalan.
- 8). Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan sarana dan prasarana produksi daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan energi dan Sumber daya mineral.
- 9). Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, agama, kebudayaan, dan kesenian pendidikan, pemuda dan olah raga.
- 10). Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang kelembagaan, Kinerja Aparatur, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik.
- 11). Masih belum optimalnya fungsional dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan protokol.
- 12). Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, sehingga sering terjadi pelaksanaan tugas antar SKPD kurang sinergis.
- 13). Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.



Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan umum, guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018.

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk mewujudkan kearah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu **Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*".**

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian,



pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKjIP Sekretariat Daerah 2018 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Adminsitratif.

1. Visi-Misi Gubernur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi mengangkat visi tersendiri tetapi mengangkat visi-misi dari Kepala Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*. Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Antara lain melaksanakan :

1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah di bidang



administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap;

2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran; Mewujudkan kebijakan umum Pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah, di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.

3. Tujuan Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, dalam Perubahan Renstra 2013-2018 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah menetapkan 8 (delapan) **tujuan (goals)** sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah yaitu :

Tujuan – 1 : **Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum,** Sasarannya adalah :

Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah anggota DPRD.

Tujuan – 2 : **Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,** Sasarannya adalah :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi



hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance

Tujuan – 3 : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra, Sasarannya adalah :

Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana

Tujuan – 4 : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD), Sasarannya adalah :

Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Tujuan – 5 : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian, Sasarannya adalah :

Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian

Tujuan - 6 : Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Sasarannya adalah :

Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.



Tujuan - 7 : **Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi**, Sasarannya adalah :

Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan - 8 : **Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan**, Sasarannya adalah:

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu sampai dengan akhir 2018, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dengan ***sasaran-sasaran*** di atas, maka ditentukan target kinerja, sebagaimana tersebut dalam Bab IV Renstra Perubahan Setda Provinsi Jawa Tengah berikut :

RENSTRA PERUBAHAN 2013-2018

Tujuan 1. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35
	2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35



	3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35
	4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35
	5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35
	6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD	7	8
	7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	50	50
	8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	2,4,5	3,4,5

Tujuan 2. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance	1 Jumlah rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah	15	77
	2 Jumlah rancangan peraturan dan keputusan gubernur yang disusun.	22	69
	3 Jumlah peraturan daerah yang dikaji	8	8
	4 Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK dan HAM.	Prov dan 35 Kab/Kota	Prov dan 35 Kab/Kota
	5 Jumlah perkara dan bantuan hukum yang diselesaikan.	186	186
	6 Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan di evaluasi.	190	195
	7 Jumlah produk hukum yang di dokumentasikan dan di sosialisasikan.	81	91

Tujuan 3. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra



Sasaran	Indikator Sasaran		2017	2018
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana	1	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	6	11
	2	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemuda dan olahraga.	2	4
	3	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang agama	11	11
	4	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan	5	5
	5	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi .	3	5
	6	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3	4
	7	Persentase kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil yang dirumuskan	2	3
	8	Jumlah kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang disusun	2	4

Tujuan 4. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD),

Sasaran	Indikator Sasaran		2017	2018
Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi	1)	Jumlah rakor dan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	7	8
	2)	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang	5	6



dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)		
	3) Jumlah pembinaan BUMD bidang keuangan	3	4
	4) Jumlah pembinaan BUMD bidang jasa dan produksi	6	4
	5) Jumlah perimbangan moda dan monev bidang perhubungan.	5	5
	6) Jumlah koordinasi dan pembinaan urusan pariwisata lintas instansi, Kab/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2	4

Tujuan 5. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	5
	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	5
	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	5
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	5
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	5
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	9	7
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	5

Tujuan 6. Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
---------	-------------------	------	------



Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.	1 Persentase SKPD rumpun ekonomi yang capaian realisasi fisik sesuai dengan RKO	84 %	86%
	2 Persentase SKPD rumpun pemerintahan sosial budaya yang capaian realisasi fisik sesuai dengan RKO	80%	85%
	3 Jumlah paket pengadaan barang jasa yang difasilitasi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah	400	425
	4 Persentase usulan program pembangunan Kab/Kota yang difasilitasi.	90,5%	92%
	5 Persentase Kab/Kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu.	86%	86%
	6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah.	400 set	400 set
	7 Jumlah kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan pendapatan, keuangan dan asset Daerah	2 set	2 Set

Tujuan 7. Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1) Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	75%	80%
	2) Jumlah kab./kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran	28	31
	3) Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan	75%	90%
	4) Persentase OPD yang ketatalaksanaan nya baik	55%	60%
	5) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	24 OPD/UPP	28 OPD/UPP
	6) Jumlah Unit Pelayanan Publik	31 UPP	34 UPP



	(UPP) yang bersertifikasi ISO		
	7) Prosentase OPD yang SAKIP nya baik	80%	90%
	8) Prosentase OPD yang baik budaya kerjanya	25%	30%
	9) Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.	100%	100%

Tujuan 8. Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitas Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.	1) Pemenuhan pelaksanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah.	100%	100%
	2) Pemenuhan Rumah Tangga pimpinan.	100%	100%
	3) Pemenuhan pelayanan acara resmi penerimaan tamu pimpinan.	100%	100%
	4) Pemenuhan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan setda.	100%	100%
	5) Pemenuhan Hubungan masyarakat dan dokumentasi pimpinan.	100%	100%
	6) Pemenuhan ketatausahaan dan rumah tangga gubernur, wakil gubernur.	100%	100%
	7) Pemenuhan penyusunan materi naskah pimpinan.	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima amanah dengan penerima amanah selama satu Tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* penting, dan



harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya :

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 telah melakukan pendatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan **38** program, **123** kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 146.193.350.000,- (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Secara singkat Program dan Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian 8 tujuan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	<i>Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.</i>		
	Sasaran : Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah anggota DPRD.		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		APBD
1.3	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		APBD
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah		APBD
2	<i>Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat</i>		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance		
2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
2.2	Program Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		APBD
3	<i>Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra</i>		
	Sasaran : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana		
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
3.2	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya		APBD
3.3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit		APBD
3.4	Program Promosi dan Pemberdayaan		APBD
3.5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		APBD
3.6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		APBD
3.7	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		APBD
3.8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		APBD
3.9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak		APBD
3.10	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesenangan Gender Dalam Pembangunan		APBD
3.11	Program Pelayanan Keluarga Berencana		APBD
3.12	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan		APBD
3.13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		APBD



4	<i>Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD)</i>		
	Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata		
4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
4.2	Program Pengembangan Perhubungan Darat		APBD
4.3	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal		APBD
4.4	Program pengembangan pemasaran pariwisata		APBD
4.5	Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang		APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		APBD
5	<i>Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.</i>		
	Sasaran : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian		
5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
5.2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		APBD
5.3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan		APBD
5.4	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		APBD
5.5	Program Pengembangan Perikanan Budidaya		APBD
5.6	Program Pengembangan Agribisnis		APBD
5.7	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah		APBD
5.8	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Dan Migas		APBD
5.9	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian		APBD
5.10	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		APBD
5.11	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		APBD
5.12	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		APBD
6	<i>Tujuan : Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.</i>		
	Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.		



6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
6.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		APBD
7	Tujuan : Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitas Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.		
	Sasaran : Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
6.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		APBD
8	Tujuan : Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitas Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan		
	Sasaran : Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.		
8.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD
8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		APBD
8.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
8.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
8.5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		

Sumber : Daftar Pelaksanaan Anggaran Setda tahun 2018

ALOKASI ANGGARAN MENURUT BIRO

No	Nama Biro	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Biro Tata Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama	13.625.900.000
2	Biro Hukum	5.800.000.000
3	Biro Administrasi Pembangunan	9.750.000.000
4	Biro Perekonomian	6.050.000.000
5	Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam	6.077.500.000
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.416.000.000
7	Biro Organisasi	7.408.850.000
8	Biro Umum	99.691.000.000

Sumber : Daftar Pelaksanaan Anggaran Setda tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menyusun **Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat** serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2018. Secara umum realisasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2018.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada tahun anggaran 2018, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 8 (delapan) tujuan dan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 59 (lima puluh sembilan) indikator kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 100%. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang **dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :**

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

mempermudah pencapaian tujuan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil capaian

kinerja 37 (tiga puluh tujuh) sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Sampai Dengan akhir tahun 2018 Sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjalankan tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun Capaian dari tujuan dan sasaran yang dilaksanakan sebanyak **8 (delapan) Tujuan** dengan **8 (delapan) Sasaran** sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian
1	Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.				
1.1	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35	100%
		Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	100%
		Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	100%
		Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	100%
		Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35	100%
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD	8	8	100%
		Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	50	96	100%
		Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	3,4,5	3,4,5	100%
2	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat				
2.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance	Jumlah rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah	15	14	93,33%
		Jumlah rancangan peraturan dan keputusan gubernur yang disusun.	22	22	100%
		Jumlah peraturan daerah yang dikaji	8	11	138,7%
		Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK dan HAM.	Prov dan 35 Kab/ Kota	Prov dan 35 Kab/ Kota	100%
		Jumlah perkara dan bantuan hukum yang diselesaikan.	195	225	115%
		Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan di evaluasi.	195	426	218%
		Jumlah produk hukum yang di dokumentasikan dan di sosialisasikan.	91	92	101%
3	Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra				
3.1	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	11	11	100%
		Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemuda dan olahraga.	4	4	100%
		Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang agama	11	11	100%
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan	5	5	100%
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi .	5	5	100%
		Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	4	100%
		Persentase kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil yang dirumuskan	3	3	100%
		Jumlah kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang disusun	4	4	100%

4	Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD),				
4.1	Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah rakor dan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	8	8	100%
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	6	6	100%
		Jumlah pembinaan BUMD bidang keuangan	4	4	100%
		Jumlah pembinaan BUMD bidang jasa dan produksi	4	4	100%
		Jumlah perimbangan moda dan movev bidang perhubungan.	5	5	100%
		Jumlah koordinasi dan pembinaan urusan pariwisata lintas instansi, Kab/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4	4	100%

5	Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.				
5.1	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	5	100%
		Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	5	100%
		Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	5	100%
		Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	5	100%
		Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	5	100%
		Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	7	7	100%
		Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	5	100%
6	Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
6.1	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.	Persentase SKPD rumpun ekonomi yang capaian realisasi fisik sesuai dengan RKO	80%	80%	100%
		Persentase SKPD rumpun pemerintahan sosial budaya yang capaian realisasi fisik sesuai dengan RKO	85%	85%	100%
		Jumlah paket pengadaan barang jasa yang difasilitasi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah	425	817	192%
		Persentase usulan program pembangunan Kab/Kota yang difasilitasi.	92%	92%	100%
		Persentase Kab/Kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu.	87%	94	10805%
		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah.	400 set	400 set	100%
		Jumlah kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan pendapatan, keuangan dan asset Daerah	2 Set	2 Set	100%

7	Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi				
7.1	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	80%		
		Jumlah kab./kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran	31		
		3) Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan	90%		
		4) Prosentase OPD yang ketatalaksanaan nya baik	60%		
		5) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	28 OPD/UPP		
		6) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO	34 UPP		
		7) Prosentase OPD yang SAKIP nya baik	90%		
		8) Prosentase OPD yang baik budaya kerjanya	30%		
		9) Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.	100%		

8	Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitas Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan				
8.1	Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.	Pemenuhan pelaksanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah.	100%	100%	100%
		Pemenuhan Rumah Tangga pimpinan.	100%	100%	100%
		Pemenuhan pelayanan acara resmi penerimaan tamu pimpinan.	100%	100%	100%
		Pemenuhan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan setda.	100%	100%	100%
		Pemenuhan Hubungan masyarakat dan dokumentasi pimpinan.	100%	100%	100%
		Pemenuhan ketatausahaan dan rumah tangga gubernur, wakil gubernur.	100%	100%	100%
		Pemenuhan penyusunan materi naskah pimpinan.	100%	100%	100%

Dari tabel sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan upaya pencapaian sebagai berikut :

TUJUAN PERTAMA : MENGOPTIMALKAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN PROGRAM DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, PENATAAN WILAYAH, PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA.

Tujuan pertama dicapai dengan melaksanakan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1.1 : Meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah anggota DPRD.

Pencapaian sasaran 1.1 tersebut berdasarkan evaluasi capaian kinerja hasil pelaksanaan sasaran strategis di tahun 2018 adalah sebesar **96,68%**. Sasaran ini meningkat 1,74% dari tahun 2017 yang tercapai sebesar 94,94%. Sasaran 1 ini diukur melalui 8 indikator kinerja sasaran **dengan capaian setiap indikator Sasaran sebagai berikut :**

- a) **Indikator Sasaran 1.1.1 :** Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan berjalan dengan baik.

Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan berjalan dengan baik.	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Realisasi Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kecamatan nya berjalan baik mencapai target 100%. Indikator ini ditunjang oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan telah memfasilitasi koordinasi kebijakan pemerintahan pusat ke daerah lingkup Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 2) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan telah melaksanakan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan terutama pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Gambar 1



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Gambar 2



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

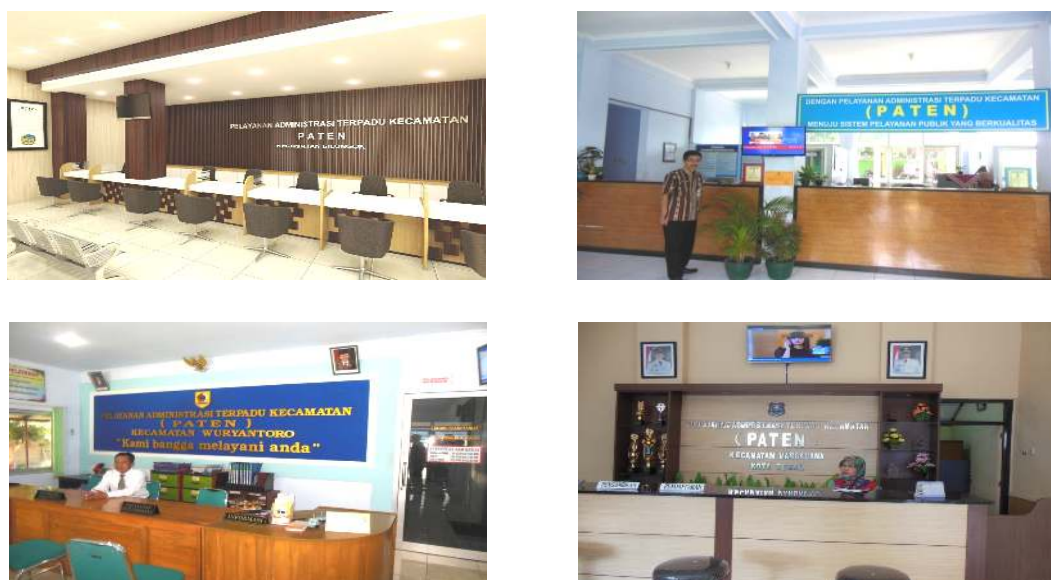
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Indikator Sasaran 1 sangat didukung oleh kebijakan Gubernur untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dari segi **kemudahan** akses, kesederhanaan administrasi hingga kenyamanan dan keramahan dalam pelayanan yang selalu ditekankan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Menginventarisir kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota hingga pelayanan di Kecamatan;
- 2) Menginformasikan perkembangan kedudukan dan peran Camat dan Kecamatan melalui sosialisasi dan koordinasi terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Petunjuk Teknis PATEN Nomor 138-270 Tahun 2010;
- 3) Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat serta optimalisasi sumber daya untuk mendukung pelaksanaan PATEN;
- 4) Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendataan kewenangan perizinan dan non perizinan di Perangkat Daerah yang dapat dilimpahkan ke kecamatan dan mendorong Bupati/Walikota untuk lebih berkomitmen atas pelaksanaan PATEN.

Langkah-langkah pencapaian target di atas merupakan penerapan rencana pengendalian yang tercantum dalam register risiko pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018, sehingga dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3



Penerapan PATEN

Adanya efisiensi sebesar 10,01% pada penggunaan sumber daya anggaran tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja sewa hotel, penggandaan, makan minum rapat dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mulai Tahun 2018, Administrasi Desa dan Kelurahan sepenuhnya menjadi bagian tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b) **Indikator Sasaran 1.1.2** Jumlah Kabupaten/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum berjalan dengan baik.

Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Indikator Sasaran 2 tercapai 100% melalui kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu. Selama tahun 2018, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama memfasilitasi penanganan 24 (dua puluh empat) konflik pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diantaranya :

- 1) Sengketa tanah warga dengan Balai Besar Wilayah Sungai terkait tanah sempadan sungai;
- 2) Sengketa tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pernah digunakan sebagai rumah dinas;
- 3) Permasalahan tanah antara masyarakat dengan BUMN dan BUMD;
- 4) Bersama Tim Persiapan Pengadaan Tanah memfasilitasi terbitnya 17 Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk

kepentingan umum (jalan tol, waduk, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Udara tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), serta daerah irigasi.

Selain itu, 23 (dua puluh tiga) unjuk rasa telah difasilitasi melalui audiensi, diantaranya :

- 1) Regulasi ojek online;
- 2) Masalah pendidikan dan kesejahteraan guru;
- 3) Kesejahteraan buruh;
- 4) Impor beras.

Penanganan konflik pertanahan dan audiensi unjuk rasa menurun 33,8% dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) konflik pertanahan dan 40 (empat puluh) unjuk rasa. Hal ini sangat didukung oleh langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan substansi aspirasi unjuk rasa;
- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan unjuk rasa;
- 3) Memfasilitasi dan menerima perwakilan pengunjuk rasa dalam audiensi bersama instansi terkait;
- 4) Membuat usulan melalui Surat Sekretaris Daerah Kepada Menteri Agama dan forum Sekretariat Wakil Presiden atas kendala proses izin pelepasan tanah wakaf untuk Proyek Strategis Nasional dan kepentingan umum lainnya, agar ada perubahan kebijakan pada izin pelepasan tanah wakaf. Usulan tersebut telah direspon oleh pemerintah pusat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 yang salah satu isinya menyatakan bahwa untuk pelepasan tanah wakaf sampai 5.000 meter persegi izin pelepasannya cukup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Gambar 4



Adanya efisiensi sebesar 0,41% pada penggunaan anggaran tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat-rapat serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

- c) **Indikator Sasaran 1.1.3** : Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi wilayahnya baik

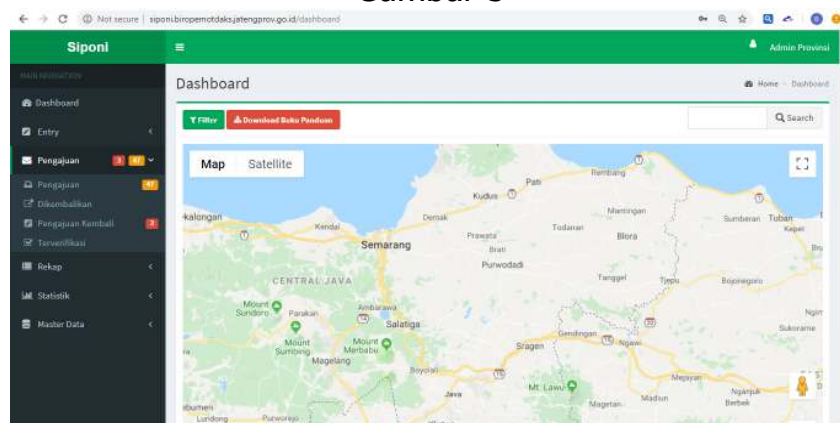
Tabel III.5
Capaian Indikator Sasaran 3

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kabupaten/ Kota yang administrasi wilayahnya baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Indikator Sasaran 3 tercapai 100% melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah yang telah menghasilkan Laporan Basis Data Rupabumi Jawa Tengah Tahun 2018 dan menyelesaikan pembangunan Sistem Informasi Toponimi (SIPONI) untuk menginventarisasi data pembakuan nama rupabumi yang implementasinya dilaksanakan mulai tahun 2019.

Gambar 5



Sistem Informasi Toponimi (SIPONI)

- 2) Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah melalui dokumen penegasan batas daerah yang ditandai dengan pemasangan 50 pilar batas (25 pilar untuk segmen Grobogan-Demak dan 25 pilar untuk segmen Temanggung-

Wonosobo) serta perawatan 80 pilar batas (40 pilar di Kabupaten Sragen dan 40 pilar di Kabupaten Banyumas).

Gambar 6



Penegasan Batas Daerah

- 3) Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah telah menghasilkan Kesepakatan perubahan Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Berubahan Batas.
- 4) Buku Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tersusun melalui Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Sampai dengan tahun 2018 telah diselesaikan 76 segmen batas yang terdiri atas 3 segmen batas antar provinsi serta 73 segmen batas antar kabupaten/kota dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Indikator Sasaran 3 sangat didukung oleh peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sehingga pelacakan dan penetapan batas-batas daerah dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan pengawasan lapangan pada tanda batas-batas daerah;
- 2) Melakukan perencanaan lebih cepat dan tepat terhadap batas-batas daerah yang belum dirapatkan maupun yang perlu pemeliharaan dengan memperhatikan faktor keselamatan kerja, cuaca, dan kontur lapangan;

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam sengketa batas, perapatan maupun pemeliharaan pilar batas;
- 4) Menetapkan syarat ketat kepada pihak ketiga yang memasang dan memelihara pilar batas agar sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Langkah-langkah pencapaian target di atas merupakan penerapan rencana pengendalian yang tercantum dalam register risiko pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018. Adanya efisiensi sebesar 2,06% pada penggunaan sumber daya anggaran tahun 2018 terdiri dari sisa kontrak jasa konsultan perapatan pilar batas, pemeliharaan pilar batas, Sistem Informasi Toponimi dan efisiensi belanja perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d) **Indikator Sasaran 1.1.4** : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPMnya baik

Tabel III.6
Capaian Indikator Sasaran 4

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Indikator Sasaran 4 tercapai 100% melalui kegiatan Koordinasi Percepatan Pencapaian SPM dengan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM yang merupakan amanat dari pasal 11 dan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disamping itu, dalam mencapai Indikator Sasaran 4 juga dilakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Indikator Sasaran 4 sangat didukung oleh komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang tertuang pada Misi 6 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi tahapan penerapan SPM dalam 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi SPM;
- 3) Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penerapan SPM;
- 4) Pelaporan SPM secara periodik;
- 5) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan alih kewenangan khususnya Personel, Prasarana Dan Sarana, Penganggaran, Dokumen (P3D) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah serta OPD terkait;
- 6) Penyelesaian Berita Acara Serah Terima P3D (Personil);
- 7) Desk verifikasi Berita Acara Serah Terima P3D (Prasarana dan sarana) dengan Sistem Informasi Manajemen Aset;
- 8) Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masih digunakannya indikator SPM dari Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Langkah-langkah pencapaian target di atas merupakan penerapan rencana pengendalian yang tercantum dalam register risiko pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018. Adanya efisiensi sebesar 1,28% pada penggunaan sumber daya anggaran tahun 2018 terdiri dari sisa kontrak jasa konsultan pembangunan sistem pelaporan SPM dan belanja sewa hotel.

- e) **Indikator Sasaran 1.1.5** : Jumlah Kabupaten/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik.

Capaian Indikator Sasaran 5

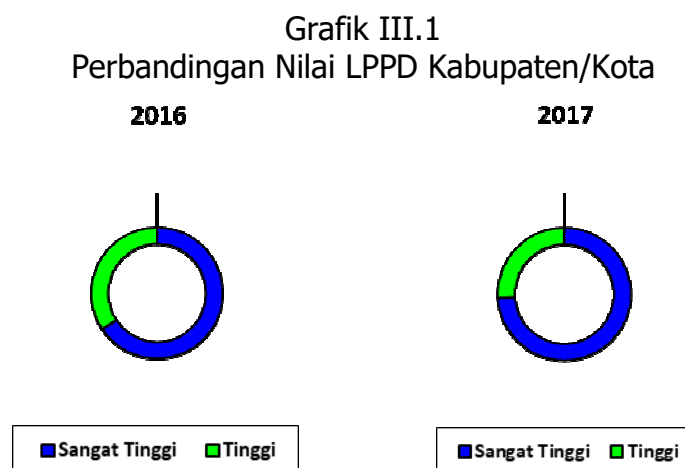
Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target
-------------------	---------------------	----------------	--------------------	---------------------------------

				Renstra
Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Hasil pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Sasaran 5 mencapai 100% dimana di dalamnya terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Analisis Dan Penyusunan LPPD Dan Informasi LPPD;
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing;
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah;
- 4) Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2013 – 2018.

Pada tahun 2018, 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2017 dengan hasil kualifikasi nilai Sangat Tinggi bagi 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota.



Hasil ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu nilai Sangat Tinggi bagi 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 12 (dua belas) Kabupaten/Kota. LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret Tahun 2018. Informasi LPPD telah disampaikan kepada masyarakat melalui Harian Suara Merdeka tanggal 25 Juli 2018 (halaman 17).

Gambar 7



Informasi LPPD

Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) *Review* pengkoordinasian kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- 2) *Pelaksanaan* bimbingan teknis penyusunan LPPD OPD provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) *Pengkoordinasian* dan pelaporan Informasi LPPD kepada masyarakat;
- 4) *Pelaksanaan* validasi dan verifikasi elemen indikator dan data dukung atas LPPD Kabupaten/Kota (selaku TIMDA) atas LPPD Tahun 2017;
- 5) *Fasilitasi* dan koordinasi proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) / pemekaran Kabupaten Brebes (persyaratan masih kurang lengkap);
- 6) *Penyusunan* dokumen LPPD dan LPKJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- 7) Pemetaan terhadap *kapasitas* daerah di 35 Kabupaten/Kota dari aspek kebijakan, kelembagaan dan sumber daya.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dilaksanakan melalui Upacara Hari Jadi Ke 68 Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang yang diisi rangkaian kegiatan seperti parade seni budaya, olahraga, bakti sosial, *job fair*, serta pameran produk unggulan daerah.

Gambar 8



Rangkaian Kegiatan Hari Jadi ke 68 Provinsi Jawa Tengah

Adanya efisiensi rata-rata sebesar 7,78% pada penggunaan sumber daya anggaran empat kegiatan tersebut di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja jasa konsultan pelaksana pesta rakyat, jasa konsultan pemetaan kapasitas daerah, jasa konsultan pembangunan sistem jaringan LPPD, serta belanja sewa hotel dan dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- f) **Indikator Sasaran 1.1.6** : Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD.

Capaian Indikator Sasaran 6

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	7 Kab/Kota Dan 1 Prov	7 Kab/Kota Dan 1 Prov (100%)	7 Kab/ Kota (100%)	35 Kab/ Kota Dan 1 Prov (100%)

Indikator Sasaran 6 tercapai 100% melalui Kegiatan Desk Pilkada Dan Proses PAW Anggota DPRD. Target yang ditetapkan serta realisasi yang dicapai merupakan pelaksanaan dari jadwal Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan tercapainya target pada Tahun 2018, maka target Renstra 2013-2018 telah tercapai 100% yaitu 35 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Fasilitasi administrasi dokumen proses peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;.
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Fasilitasi administrasi dokumen pensiun mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) Fasilitasi proses 34 izin cuti kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Fasilitasi administrasi 70 dokumen proses peresmian pengangkatan dan pemberhentian serta PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 11 DPRD Provinsi yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- 6) Pembinaan proses PAW di Kab/Kota.

Gambar 9





Pelantikan Pj dan Pjs Kepala Daerah

Adanya efisiensi sebesar 0,27% pada penggunaan sumber daya anggaran Kegiatan Desk Pilkada Dan Proses PAW Anggota DPRD di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja jasa konsultan pengembangan sistem jaringan administrasi kepala daerah, belanja makan minum dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

g) **Indikator Sasaran 1.1.7** : Jumlah naskah kerjasama dalam negeri.

Capaian Indikator Sasaran 7

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50 Naskah	96 Naskah (100%)	93 Naskah (100%)	677 Naskah (100%)

Indikator Sasaran 7 tercapai melalui Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri. Realisasi jumlah naskah kerjasama meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 93 naskah. Dalam periode Renstra Tahun 2013-2014, naskah kerjasama dalam negeri berjumlah 677 naskah. Realisasi naskah kerjasama jauh melebihi target karena inisiasi kerjasama tidak hanya berasal dari Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama, melainkan juga berasal dari OPD teknis dan Pihak Ketiga. Hasil kerjasama selama tahun 2018 antara lain :

- 1) Kerjasama Jawa-Bali dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama;
- 2) Kerjasama dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;
- 3) Kerjasama kewilayahan antar Kabupaten Kota di Jawa Tengah;

- 4) Mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Memfasilitasi nelayan Jawa Tengah agar dapat memperluas wilayah penangkapan ikan ke daerah Kalimantan Tengah melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perikanan Tangkap Dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan;
- 6) Mewujudkan angkutan aglomerasi perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng guna mendukung angkutan umum masal dengan tarif terjangkau melalui Perjanjian Kerja Sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang tentang Pengelolaan Bersama Sarana Dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jawa Tengah Dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

Gambar 10



Kerjasama Dalam Negeri

Adanya efisiensi sebesar 6,08% pada penggunaan sumber daya anggaran Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja sewa hotel, makan minum dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi kerjasama.

- h) **Indikator Sasaran 1.1.8** : Jumlah negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri.

Capaian Indikator Sasaran 8

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri	12	12 (100%)	11 (100%)	55 (100%)

Indikator Sasaran 8 tercapai 100% melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri. Target kinerja merupakan akumulasi dari jumlah kunjungan delegasi negara lain, jumlah MOU dan jumlah perjanjian teknis luar negeri. Pada tahun 2018, target tercapai 100% dengan rincian penerimaan 8 delegasi negara lain dan 4 MOU *sister province*. Realisasi ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya karena peningkatan jumlah kunjungan delegasi negara lain. Capaian ini sangat didukung oleh tingginya peran OPD teknis dalam pencapaian tujuan yang melibatkan kerjasama dengan negara lain, seperti perluasan pemasaran wisata, peningkatan program pertukaran pelajar dan guru, serta perluasan pasar perdagangan. Dalam rentang periode Renstra Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan penerimaan 27 delegasi negara lain, 4 MOU *sister province* (Queensland-Australia, Fujian-Republik Rakyat Tiongkok, Siem Reap-Kamboja dan Chung Cheongbuk-do – Korea), serta 24 Perjanjian Teknis Luar Negeri. Realisasi melebihi target karena inisiasi kerjasama berasal dari Kementerian/Lembaga dan OPD teknis. Hasil kerja sama luar negeri selama tahun 2018 antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan Guru Bahasa Inggris, penajakan peluang kemitraan di bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata dan bisnis antara melalui kerja sama dengan Negara Bagian Queensland, Australia;

- 2) Pengenalan budaya dan peningkatan perdagangan melalui kerja sama dengan Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok;
- 3) Kerjasama bidang infrastruktur, penanggulangan bencana, dan pengolahan sampah dengan Denmark, Hungaria, Inggris, Australia, Suriname, Perancis, Singapura, Tiongkok, Korea, Belanda, Thailand, dan Rusia.

Disamping itu Provinsi Jawa Tengah juga menjalin kerjasama dengan 8 (delapan) *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang mempunyai program kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- *Vredeseilanden-Coopibo Non-Profit Association (VECO)* Swedia dengan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi penanggulangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan desa berwawasan sosial dan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.
- *Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)* Belanda dengan program *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa* meliputi peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan kegiatan di Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Semarang, Grobogan, Demak, Banjarnegara, Cilacap, Pekalongan, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Batang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta.
- *PLAN International Incorporation (PLAN)* Spanyol dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, tumbuh kembang anak usia dini, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi kaum muda dan tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Rembang, Grobogan dan Kebumen.
- *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* Jerman dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan meliputi pengembangan usaha mikro dan kecil, pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dan bantuan kemanusiaan di Kabupaten Klaten.
- *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)* Belanda dengan program pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan meliputi pertanian terpadu dan berkelanjutan, penyediaan air bersih dan sanitasi, energi baru dan terbarukan serta respon terhadap perubahan iklim di Kabupaten Boyolali dan Wonosobo.

- *Swiss Contact* dengan program pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat meliputi *pengembangan* ekonomi masyarakat perkotaan dan/atau perdesaan berfokus pada pengembangan usaha menengah kecil, pendidikan dan pelatihan, pertanian, pariwisata dan lingkungan di Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang dan Blora.
- *Konrad Adeneur Stiftung (KAS)* Belanda dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang.
- *The Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement International (OISCA)* Jepang dengan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi program pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, program pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dan program bantuan masyarakat di Kabupaten Pekalongan, Demak, Jepara dan Pati.

Gambar 11



Penerimaan Peserta Program Pendidikan Lemhanas dari 6 Negara
dan Penerimaan Delegasi Fujian RRT

Dalam melaksanakan seluruh kerjasama di atas, diperlukan fasilitasi izin perjalanan dinas luar negeri serta izin perjalanan bukan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang juga merupakan bagian dari tugas Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama. Pada tahun 2018 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama telah memfasilitasi 94 perizinan.

1. Target Dan Realisasi Jangka Menengah Sasaran 1

Target dan realisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebagai berikut :

Tabel III.11

Target Dan Realisasi Renstra 2013-2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target s.d 2018	Realisasi s.d 2018	%
Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35	100
	2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	100
	3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	100
	4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	100
	5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35	100
	6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD	36	36	100
	7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	182	677	100
	8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	27	55	100

Sampai dengan tahun 2018, seluruh indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah tercapai. 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penyelenggaraan administrasi kecamatan dengan baik yang dilihat dari penerapan PATEN di 35 Kabupaten/Kota pada bulan Juli tahun 2016. Implementasi PATEN ini terus ditingkatkan kualitasnya sampai akhir tahun 2018. Dengan banyak keterbatasan sumber daya, Pemerintah Kabupaten/Kota terus mengupayakan perbaikan seperti kelayakan ruangan dan kecukupan sumber daya manusia. Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada periode Renstra selanjutnya antara lain :

- a. Kepastian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat;
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor perijinan agar tidak terjadi kekeliruan pemberian pelayanan yang dapat mempersulit masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan bagi petugas.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa hanya dilaksanakan sampai dengan Tahun 2016. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas dan fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sampai dengan tahun 2016, telah dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa kepada 29 Kabupaten di Jawa Tengah.

Penyelesaian masalah pertanahan (khusus bagi penyediaan fasilitas publik) serta masalah keamanan dan ketertiban umum (khusus unjuk rasa di lingkungan kantor Gubernur Jawa Tengah) menjadi target baru pada Renstra Perubahan Tahun 2013-2018. Pemetaan dan identifikasi masalah pertanahan di Kabupaten/Kota dilakukan setiap tahun sebagai bentuk layanan administrasi pertanahan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional maupun penyediaan infrastruktur daerah. Audiensi, mediasi dan fasilitasi administrasi kebijakan dalam penyelesaian konflik pertanahan maupun unjuk rasa yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir berdampak pada menurunnya jumlah konflik setiap tahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kondusivitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Administrasi wilayah yang mencakup batas daerah, rupabumi dan kode data wilayah telah berjalan baik di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dalam periode Renstra Tahun 2013-2018 telah diselesaikan administrasi batas daerah di 76 segmen yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tambahan 38 pulau di wilayah Jawa Tengah telah didaftarkan ke PBB dalam 10th *The United Nation Conference on Standardization on Geographical Names (UNCSGN)* dengan rincian tambahan 3 pulau di wilayah Kabupaten Jepara, 6 pulau di wilayah Kabupaten Kebumen dan 29 pulau di wilayah Kabupaten Cilacap. Kode dan data administrasi wilayah dari setiap Kabupaten/Kota telah dibukukan dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri setiap tahun sebagai dasar penyediaan data untuk dana desa dan daerah pemilihan dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif.

Urusan pemerintahan dan penerapan SPM telah dilaksanakan dengan baik di 35 Kabupaten/Kota, diantaranya pengkoordinasian tahapan penerapan SPM dalam 6 urusan wajib terkait layanan dasar dalam dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten/Kota serta penyelesaian berita acara serah terima dan verifikasi P3D.

Dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah melaporkannya dengan baik dalam kualifikasi nilai Tinggi dan Sangat Tinggi. Diraihnya penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap akuntabilitas pemerintahan.

Fasilitasi administrasi Kepala Daerah, Anggota DPRD serta kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dan jadwal yang telah ditetapkan. Sepanjang periode Renstra Tahun 2013-2018, 35 Kabupaten/Kota telah difasilitasi administrasi kepala daerahnya mulai dari usulan pelantikan, penyelesaian konflik Kepala Daerah, usulan Penjabat dan Penjabat Sementara hingga usulan pensiun serta pergantian antar waktu bagi anggota DPRD. Fasilitasi kerjasama yang meliputi penyusunan naskah kerjasama hingga pemantauan dan evaluasi kerjasama dilakukan secara bertahap sesuai dengan usulan kerjasama dari OPD teknis dan memperhatikan jangka waktu kerjasama. Seluruh tahapan fasilitasi tersebut diharapkan dapat mendorong ketercapaian sasaran dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Pencapaian Sasaran 1.1 sebagaimana tersebut diatas didukung oleh sumberdaya keuangan sebagaimana berikut :

- 1) Indikator sasaran **1 (Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kecamatan dan Desa/ Kelurahan berjalan dengan baik)** sebesar Rp. 645.000.000,-
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 580.528.403,- (89,98%)** dengan adanya efisiensi belanja sewa hotel, penggandaan, makan minum rapat dan perjalanan dinas.
- 2) Indikator sasaran **2 (Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik)** sebesar Rp. 505.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 503.126.141,- (99,58%)** dengan adanya efisiensi belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.
- 3) Indikator sasaran **3 (Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik)** sebesar Rp. 1.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.082.970.440,- (97,94%)** dengan adanya sisa kontrak jasa konsultan perapatan pilar batas, pemeliharaan pilar batas dan sistem informasi toponimi serta efisiensi belanja perjalanan dinas.
- 4) Indikator sasaran **4 (Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik)** sebesar Rp. 770.300.000,-
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 760.432.750,- (98,71%)** karena adanya sisa kontrak jasa konsultan pembangunan sistem pelaporan SPM dan belanja sewa hotel.

5) Indikator sasaran **5 (Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik)** sebesar Rp.4.580.000.000,-
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.223.621.400,- (92,21%)** karena adanya sisa kontrak jasa konsultan pelaksana pesta rakyat, jasa konsultan pemetaan kapasitas daerah, jasa konsultan pembangunan sistem jaringan LPPD, serta efisiensi belanja sewa hotel dan dan perjalanan dinas.

TUJUAN KEDUA : MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT.

Tujuan Kedua dicapai dengan melaksanakan sasaran :

Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan *good governance*.

Sasaran Strategis 2.1 tersebut terdiri dari 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran yaitu : jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun/ direvisi, jumlah Peraturan Gubernur yang disusun, Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji, Jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi, Jumlah rapat peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK, jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM, jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM, jumlah penanganan perkara perdata dan TUN, jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah, jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu, jumlah penanganan aset, jumlah raperda Kabupaten/Kota yang dievaluasi, Jumlah Raperbup Kabupaten/Kota yang difasilitasi, jumlah produk hukum yang disosialisasikan serta jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra Th 2018	% Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Real	% capaian		
1.	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun	raperda	12	15	14	93.33	77	100
2.	Jumlah Peraturan	Produk	22	22	22	100	69	100

	Gubernur yang disusun	hukum						
3.	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji	rekomen dasi	8	8	11	137.5	36	81
4.	Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK	Prov dan Kab/Kota	36	36	36	100	36	100
	Jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM	Prov dan Kab/Kota	36	36	36	100	36	100
	Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM	Aduan	3	10	3	30	37	62
5.	Jumlah penanganan perkara perdata dan TUN	perkara	29	6	18	300	28	357
	Jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah	Aduan	0	5	3	60	23	70
	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	perkara	180	180	180	100	810	100
	Jumlah penanganan aset	advokasi	4	4	4	100	16	81
6.	Jumlah raperda Kab/Kota yang dievaluasi	raperda	71	50	65	130	250	113
	Jumlah raperbup Kab/Kota yang difasilitasi	Produk hukum	469	145	361	248.97	675	375
7.	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	Produk hukum	1	1	2	200	5	120
	Jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	dokumen	80	90	90	100	345	161
Prosentase Capaian Sasaran Strategis						117.22		129.69

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan *good governance* tercapai sebesar 117,22 % (seratus tujuh belas koma dua puluh dua persen) atau kategori **sangat baik**.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan semula 126,25 % (seratus dua puluh enam koma dua puluh lima persen) tercapai sebesar 117,22 % (seratus tujuh belas koma dua puluh dua persen). Hal ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya target dari indikator jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi, jumlah rapat peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM, jumlah penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM serta jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan daerah.

Untuk Capaian kinerja Tahun 2018 pada sasaran strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah telah tercapai 129,69% (seratus dua puluh Sembilan koma enam puluh Sembilan persen), ini berarti telah melampaui target sebesar 29,69% (dua puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen) yang dipengaruhi oleh indikator jumlah penanganan perkara perdata dan TUN, jumlah raperda Kabupaten/ Kota yang dievaluasi, jumlah Raperbup Kabupaten/ Kota yang difasilitasi, jumlah produk hukum yang disosialisasikan serta jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Indikator Sasaran 1.1.1 : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun tercapai 93,33 % (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen), dimana Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun tercapai 14 Perda dari jumlah target 15 Perda. Hal tersebut karena dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2018 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu karena melibatkan berbagai pihak dengan kendala penyusunan Raperda di tingkat SKPD Pemrakarsa membutuhkan kajian teknis dan uji publik yang panjang karena substansinya kompleks, menunggu penjadwalan pembahasan bersama legislatif dan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa untuk Raperda juga harus memperoleh evaluasi, fasilitasi dan nomor register oleh Menteri Dalam Negeri.

Tabel 3.3.
Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

NO PERDA	JUDUL PERDA	TANGGAL		LD	TLD
		DITETAPKAN	DIUNDANGKAN		
1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu	14-02-2018	14-02-2018	1	95
2	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	14-02-2018	14-02-2018	2	96
3	Pengelolaan Air Tanah	23-03-2018	23-03-2018	3	97
4	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23-03-2018	23-03-2018	4	98
5	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan	26-06-2018	26-06-2018	5	99
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jateng TA 2017	06-08-2018	06-08-2018	6	-

7	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	15-10-2018	15-10-2018	7	100
8	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2013 tentang Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah	15-10-2018	15-10-2018	8	101
9	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah	15-10-2018	15-10-2018	9	102
10	Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah	15-10-2018	15-10-2018	10	103
11	Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018	19-10-2018	19-10-2018	11	-
12	Rencana Umum Energi Daerah	19-12-2018	19-12-2018	12	104
13	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tahun 2018-2038	21-12-2018	21-12-2018	13	105
14	APBD Prov Jateng TA 2019	21-12-2018	21-12-2018	14	-

Indikator Sasaran 1.1.2 : Jumlah Peraturan Gubernur yang disusun direncanakan menyusun 22 produk hukum berhasil melakukan harmonisasi sebanyak 22 Peraturan Gubernur sehingga persentase untuk indikator jumlah Peraturan Gubernur yang disusun tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Indikator Sasaran 1.1.3 : Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji direncanakan menghasilkan 8 rekomendasi hasil pengkajian berhasil mengeluarkan 11 rekomendasi hasil pengkajian produk hukum sehingga persentase capaian untuk indikator Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji tercapai sebesar 137,5% (seratus tiga puluh tujuh koma lima persen).

Indikator Sasaran 1.1.4 : Rakor pencegahan pemberantasan korupsi tidak tercapai dari target 4 rakor dan hanya dapat terlaksana 1 rakor karena pada tahun 2018 sedang disusun Aksi Pencegahan Korupsi untuk pertama kalinya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, sehingga persentase capaian indikator jumlah rakor pencegahan pemberantasan korupsi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Peningkatan Kabupaten/ Kota Peduli HAM juga tidak dapat tercapai 2 kali rapat sesuai dengan target yang ditetapkan karena adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kabupaten/ Kota Peduli HAM dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari HAM sedunia, sehingga persentase capaian indikator jumlah rapat peningkatan Kabupaten/ Kota Peduli HAM sebesar 50% (lima puluh persen).

jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK yang direncanakan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah sehingga dapat tersusun aksi PPK baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran tercapai secara keseluruhan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penyusunan dan pelaporan aksi PPK sebesar 100% (seratus persen). jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM yang direncanakan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah sehingga dapat tersusun aksi HAM baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran tercapai secara keseluruhan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penyusunan dan pelaporan aksi HAM sebesar 100% (seratus persen).

Penerimaan Penghargaan Provinsi Jawa Tengah Sebagai
Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017 yang dianugerahkan di Tahun 2018



Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM tercapai 30% (tiga puluh persen) yang direncanakan 10 aduan dapat ditangani, namun pada Tahun 2018 aduan yang masuk dan ditangani Biro Hukum sejumlah 3 aduan hal tersebut didasarkan bahwa pada tahun 2018 untuk aduan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sehingga tidak ada aduan masyarakat yang langsung ditujukan atau masuk ke Biro Hukum.

Indikator Sasaran 1.1.5 : jumlah penanganan perkara perdata dan TUN sebesar 300% (tiga ratus persen) melebihi dari target yang ditetapkan 6 perkara tercapai 18 Perkara yaitu perkara Perdata sejumlah 13 perkara dan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sejumlah 5 perkara.

Perkara Perdata/TUN yang Ditangani
Biro Hukum SETDA Prov. Jateng Tahun 2018

NO	BULAN	PERKARA	
		PERDATA	TUN
1	2	3	4
1	JANUARI	497/Pdt.G/2017/PN.Smg terkait Perbuatan Melawan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Djumali Berada di Candi	79/G/2017/PTUN.Smg terkait PAW Kota Semarang
		499/Pdt.G/2017/PN.Smg terkait Dinkop Prov Jateng dianggap tdk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan	-
2	FEBRUARI	32/Pdt.G/2017/PN.Kdl terkait PMH Atas Persil tanah warga di Kab Kendal	-
1	2	3	4
		492/Pdt.G/2017/PN.Smg terkait Dinlutkan Prov Jateng dianggap tdk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan	-
3	MARET	96/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait Dinkop Prov Jateng dianggap tdk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan	31/G/2018/PTUN.Smg terkait Keputusan Kepala SMAN 1 Semarang pengembalian siswa kpd ortu
		68/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait PMH Atas kepemilikan sertifikat HP 12 Mangkang	-
4	APRIL	-	38/G/2018/PTUN.Smg terkait Surat Keputusan Pemenang Lelang
5	MEI	147/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait dengan Aset POLDA yang berada di Daerah Erlangga Semarang	55/G/2018/PTUN.Smg terkait pengosongan rumah Balai Dinas Sosial yang berada di Demak
6	JUNI	-	75/G/2018/PTUN.Smg terkait Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Salatiga
7	JULI	227/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait Surat Pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua	-
		36/Pdt.G/2018/PN.Slt terkait PMH atas Pemberhentian Ir. Hj. Diah Sunarsasi sbg Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga	-
		222/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait gugatan koperasi	-
8	AGUSTUS	-	-
9	SEPTEMBER	375/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait gugatan aset Pemprov Jateng di Jalan Durian Raya Banyumanik	-

		296/Pdt.G/2018/PN.Smg terkait gugatan koperasi	
10	OKTOBER	-	-
11	NOVEMBER	38/Pdt.G/2018/PN Mgg terkait aset Dinsos Balai Pelayanan Sosial Kumuda Putra Putri Magelang	-
12	DESEMBER	-	-

Gambar 3.2.
Rapat Penanganan Perkara Perdata/TUN



Jumlah penanganan aduan masyarakat terkait dengan pemerintahan daerah tercapai 60% (enam puluh persen) yang direncanakan 5 aduan dapat ditangani pada Tahun 2018, namun aduan yang masuk dan ditangani sejumlah 3 aduan hal tersebut didasarkan bahwa pada tahun 2018 untuk aduan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sehingga tidak ada aduan masyarakat yang langsung ditujukan atau masuk ke Biro Hukum.

Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu secara keseluruhan tercapai dari yang direncanakan pemberian bantuan untuk 180 perkara dapat diberikan semuanya sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Tabel 3.5.
LBH yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Dalam Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2018

NO	NAMA LBH
1	Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

2	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM)
3	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap
4	Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng
5	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah
6	Yayasan Atma Surakarta
7	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto
8	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal
9	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) Wonosobo
10	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Kudus
11	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara
12	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng
13	Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo
14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu
15	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara

jumlah penanganan aset secara keseluruhan tercapai dari target 4 advokasi aset telah dilakukan advokasi terhadap aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- Aset Balai Pelayanan Sosial Kumuda Putra Putri Magelang yang berada dalam inventarisasi aset Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Aset dalam HP 04 terletak di Desa Tegalandong Tegal yang berada dalam inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Aset dalam HP No 6 Tahun 1993 terletak di Kelurahan Karangasem Batang yang berada dalam inventarisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Aset SMA Negeri 1 Jeruk Legi terletak di Desa Tritih Kecamatan Jeruk Legi Cilacap yang berada dalam inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,

sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah penanganan aset tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Indikator Sasaran 1.1.6 : jumlah raperda Kabupaten/Kota yang dievaluasi juga melebihi dari target yang ditetapkan 50 Raperda tercapai 65 Raperda sehingga persentase capaian sebesar 130% (seratus tiga puluh persen).

jumlah Raperbup Kabupaten/Kota yang difasilitasi juga tercapai 248,97% (dua ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh tujuh persen) dimana target yang ditetapkan 145 Produk Hukum terealisasi 361 Produk Hukum.

Indikator Sasaran 1.1.7 : jumlah produk hukum yang disosialisasikan semula dengan target 1 produk hukum tercapai 2 produk hukum yaitu :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,
- sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah produk hukum yang disosialisasikan tercapai 200% (dua ratus persen).

Gambar 3.3.

Sosialisasi Perda Prov. Jateng Tahun 2018



jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara keseluruhan tercapai dari yang direncanakan 90 dokumen dapat tercapai 90 dokumen yang didokumentasi dan diinformasikan sehingga persentase capaian untuk indikator jumlah dokumen bahan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Gambar 3.4.

Penerimaan Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik II Tahun 2018 Kategori Pemerintah Provinsi





Anggaran Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum, Pelayanan Informasi Hukum Serta Meningkatnya Penyelesaian Sengketa, Penghargaan Terhadap HAM, Dan *Good Governance* adalah sebesar Rp. 5.797.200.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau 99,95% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh lima persen) dari total pagu sebesar Rp. 5.800.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah;
2. Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum;
4. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK; dan
5. Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2018 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu karena :
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan penetapannya melibatkan banyak unsur di Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri dan

- Kementerian terkait untuk dilakukan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register sehingga mengakibatkan proses penyusunan Peraturan Daerah membutuhkan waktu cukup lama;
- b. Memerlukan penyesuaian jadwal dan agenda pembahasan antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 3. Masih terdapat Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 4. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait proses penyusunan produk hukum daerah;
 5. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah belum tersedia dalam bentuk android, sehingga masyarakat belum dapat melakukan pencarian produk hukum Provinsi Jawa Tengah secara lebih cepat dan mudah.

Alternatif solusi untuk hambatan dan kendala:

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register secara efisien dan efektif;
 - b. Perangkat Daerah pemrakarsa dalam rangka percepatan penyusunan Raperda;
 - c. DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perencanaan dan penjadwalan pembahasan Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan dari Perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Perlu adanya koordinasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dijalankan Pemerintah Daerah khususnya terkait indikator kinerja, capaian dan realisasi kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan materi/ substansi Produk Hukum Daerah yang dievaluasi atau difasilitasi;
5. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan

pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/ Kota oleh Gubernur;

6. Perlunya penyediaan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk android.

TUJUAN KETIGA : MENGOPTIMALKAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN PROGRAM DAN FASILITASI ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBINAAN MENTAL.

Tujuan ketiga dicapai dengan melaksanakan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 3.1 Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 3.1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	11	11	100%	100%	100%
	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemuda dan olahraga.	4	4	100%	100%	100%
	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang agama	11	11	100%	100%	100%
	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan	5	5	100%	100%	100%
	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi .	5	5	100%	100%	100%

	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	4	100%	100%	100%
	Persentase kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil yang dirumuskan	3	3	100%	100%	100%
	Jumlah kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang disusun	4	4	100%	100%	100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis 3.1 "Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan." dapat dicapai sesuai dengan target. Tahun 2018 Sasaran ini tercapai sebesar 100% sama dengan pencapaian sasaran Tahun 2017. Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis 3.1 Tahun 2018 didukung oleh:

1. Terlaksananya 5 kegiatan bidang keagamaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Kesra, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Kesra, dengan capaian fisik 100%.
 - Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan peribadatan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dengan capaian fisik 100%
2. Koordinasi serta monitoring evaluasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya bidang keagamaan.
3. Komunikasi yang efektif dengan OPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Dibandingkan dengan pelaksanaan Sasaran Meningkatkan keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan. TA 2017, pelaksanaan Sasaran 3.1 Meningkatkan keterpaduan dan

tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan. 2018 dapat dicapai 100% sama halnya dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.1 adalah sebesar Rp. 5.977.814.323,- atau 90,57% dari total pagu sebesar Rp. 6.600.000.000,-.

Sasaran 3.2 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 3.2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realis asi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
Jumlah koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kegiatan)	2 keg	2 keg	100%	100%	100%
Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)	35 kab/kota	35 kab/kota	100%	100%	100%
Jumlah koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi (kegiatan)	6 keg	6 keg	100%	100%	100%
Jumlah koordinasi berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan (kegiatan)	2 keg	2 keg	100%	100%	00%
Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan (kab/kota)	35 kab/kota	35 kab/kota	100%	100%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran 3.2 “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.” dapat dicapai sesuai dengan target tercapai 100% sama dengan pencapaian target sasaran Tahun 2017.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis ini didukung oleh:

1. Terlaksananya 10 kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yaitu:
 - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan pada Kelompok Lansia, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi P4GN, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kesenian dan Nilai Budaya, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Bidang Ketramigrasian, dengan capaian fisik 100%
2. Koordinasi serta monitoring evaluasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Komunikasi yang efektif dengan OPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategi 3.2 adalah sebesar Rp. 3.055.635.612,- atau 94,75% dari total pagu sebesar Rp. 3.225.000.000,-.

Sasaran 3.3 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 3.3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 3.3 "Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga." dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan atau pencapaian target sasaran telah optimal sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis ini Tahun 2018 didukung oleh:

1. Terlaksananya 7 kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu:
 - Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan, dengan capaian fisik 100%
 - Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) , dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan capaian fisik 100%

2. Koordinasi serta monitoring evaluasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota serta stakeholder lainnya bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.
3. Komunikasi yang efektif dengan OPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategi 3.1. adalah sebesar Rp. 1.504.681.350,- atau 94,57% dari total pagu sebesar Rp. 1.591.000.000,-.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tujuan ketiga ini, pada Tahun Anggaran 2018 Sasaran meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan. mendapatkan alokasi anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 11.416.000.000,- (sebelas milyar empat ratus enam belas juta rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2018 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 10.538.131.285,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau terserap sebesar 92.31% dari total APBD Perubahan TA 2018. Dari realisasi sebesar Rp 10.538.131.285,- tersebut, terdapat deviasi (SILPA) sebesar 7.69% atau senilai Rp. 877.868.715,- (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang dikarenakan adanya efisiensi pada belanja langsung belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 448.562.545,-
- b. Belanja kelengkapan rapat koordinasi (workshop/FGD/rakor) termasuk honorarium narasumber sebesar Rp 408.706.170,-

TUJUAN – 4 : MENGOPTIMALKAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN PROGRAM DAN FASILITASI ADMINISTRASI PENINGKATAN, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH DAERAH (BUMD),

Tujuan keempat dicapai dengan melaksanakan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 4.1. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan

UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2017 (%)	Capaian Th. 2016 (%)	% Capaian thd target akhir Renstra
Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	1) Jumlah rakor dan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	7	7	100%	100%	80%
	2) Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	5	5	100%	100%	80%
	3) Jumlah pembinaan BUMD bidang keuangan	3	3	100%	100%	80%
	4) Jumlah pembinaan BUMD bidang jasa dan produksi	6	6	100%	100%	80%
	5) Jumlah perimbangan moda dan monev bidang perhubungan.	5	5	100%	100%	80%
	6) Jumlah koordinasi dan pembinaan urusan pariwisata lintas instansi, Kab/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2	2	100%	100%	80%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran **“Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD)”** pada tahun 2018 **terrealisasi 100%** atau **kategori sangat baik**. Capaian sasaran ini tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan **indikator sasaran baru** karena merupakan **Perubahan Renstra Organisasi** karena perubahan Tugas dan fungsi akibat dari terbitnya Permendagri 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra perubahan Tahun 2013-2018 target kinerja ini akan tercapai sesuai dengan rencana.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan 6 indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Pengukuran ke tiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator sasaran 4.1.1 tercapai sebesar 100% dari target direncanakan atau pencapaian sama dengan Tahun sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Kebijakan di bidang Prindustrian dan perdagangan didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Rakor TPD guna sinergitas TPID Provinsi dan Kab/Kota1 kali di wisma perdamaian dengan peserta 175 anggota TPID Provinsi dan Kab/Kota, inflasi 2,73 %.
2. Rakor EKUINDA Terbentuknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota dengan melibatkan pelaku usaha agar lebih pro aktif menghadapi hari besar keagamaan1 Kali di Gradika Bhakti Praja denga peserta 300 orang FKPD, Bupati dan walikota, Ka. SKPD Provinsi Jateng, Ka. Polres se Jateng, Lembaga Perbankan. PT dan Asosiasi dalam rangka Persiapan Pemprov dan Kab/Kota dalam menghadapi hari Lebaran.
3. Rakor Raskin Terbentuknya persamaan persepsi/cara pandang dalam penyaluran raskin2 kali, di semarang dan Surakarta, peserta @ 250 orang dari TIM Raskin Prov. Jateng dan Kab/Kota, Ka. Bakorwil dan Kasubag Divre dan Ka, Gudang Builog se Jawa Tengah.
4. Efektivitas raskin pada 4 ketepatan(tepat sasaran, jumlah, waktu dan administrasi) Rakor Ekuinda dilaksanakan dalam rangka Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaku usaha dalam menghadapi Hari Raya.
5. Koordinasi pelaksanaan Raskin 7 kali, di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Jakarta dan Banjarmasin)
6. Efektifitas penyaluran Raskin pada 6 Tepat (sasaran, Jumlah, Waktu, Harga, Kualitas dan Administrasi)
7. Pemantauan Kepokmas danTPID Dapat mengetahui perkembangan harga komoditas strategist dan kebutuhan pokok masyarakat di Kab/Kota serta informasi inflasi di Daerah8 kali, di Kab/Kota SBH dan Kab/Kota sekitar Pemantauan komoditas strategis/kepokmas dilaksanakan guna pengendalian harga komoditas strategis/kepokmas
8. Monitoring kegiatan TPID Kab/Kota dan Harga dalam menghadapi dan pasca Hari Raya bidul Fitri
9. Rakor pengembangan kerajinan daerah Terbentuknya persamaan persepsi/cara pandang dalam mengimplemantasikan program pemerintah di bidang pengembangan kerajinan di Jawa1 kali, dilaksanakan di UMKM center dengan peserta 175 orang terdiri dari ketua dan pengurus Deskranasda Prov. Dan Kab/Kota se Jateng Penyelarasan program-program pengembangan kerajinan antara Provinsi dan Kab/Kota
10. Koordinasi Bidang perindag Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi bidang perindustrian dan perdagangan. 1. 9 kali di Kab/Kota Jawa Tengah, Pendampingan Kunker DPRD Bidang Perundangan. Berupa pendampingan kegiatan DPRD serta Koordinasi dan konsultasi peningkatan program perindustrian dan perdaganagan

Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dilaksanakan dalam rangka memberikan arahan serta menampung masukan dari 35 Kab/Kota serta SKPD Provinsi terkait, agar dalam memanfaatkan dana cukai tepat sasaran dan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang berlaku dan berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, serta Pembentukan Forum Komunikasi Provinsi Pengelola DBHCHT di 17 Provinsi Pengelola

1) Permasalahan dan Kendala

Bantuan hibah terkendala peraturan dimana kelompok penerima bantuan harus berbadan hukum. Masih banyak kelompok yang belum berbadan hukum, sehingga belum bisa difasilitasi oleh DBHCHT.

2) Antisipasi Pemecahan Masalah

Melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat.

Indikator Sasaran 4.1.2 tercapai sebesar 100% dari target direncanakan atau pencapaian sama dengan Tahun sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Koordinasi bidang Promosi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Promosi Dalam Negeri. Materi fasilitasi dan koordinasi sesuai kebutuhan dan dinamika perkembangan permasalahan dibidang Promosi Dalam Negeri.

1) Permasalahan dan Kendala

Ekspor Non Migas belum memiliki akses pasar yang cukup, oleh karena itu diperlukan dorongan kepada pengusaha berupa fasilitasi promosi sehingga UMKM mendapat akses pasar dan dapat menjual hasil produksinya.

2) Antisipasi Pemecahan Masalah

Memfasilitasi promosi sehingga UMKM mendapat akses pasar dan dapat menjual hasil produksinya.

Terlaksananya rakor dan pelaksanaan kebikan perindustrian dan perdagangan terpenuhi 100%. Indikator sasaran ini didukung oleh target kegiatan sebagai berikut :

Terlaksananya koordinasi guna peningkatan ekspor non migas rnya koordinasi 19 Kab/Kota untuk pameran :

1. Inacraft
2. Jakarta fair
3. Java Expo
4. Jateng fair
5. Katombiri
6. Indocraft

Terselenggaranya koordinasi jaringan pasar UKM Jateng ke Pasar Nasional

Terselenggaranya 4 kali pameran di Jakarta (inacraft, Jakarta Fair, Indocraft dan Katombiri), 1 Kali pameran di Semarang (Jateng fair) dan 1 kali pameran di Surakarta (Java Expo)

Transaksi :

1. Inacraft, UKM Bordis Dahlia Kudus Rp. 51.000.000
2. Jakarta fair, UKM Batik Asri Rp. 10.000.000
3. Jateng fair, UKM Batik Eny dan Ely Rp. 10.000.000
4. Java Expo, UKM Batik Bakaran Pati Rp. 17.500.000
5. Indocraft, UKM Batik Ruach Rembang Rp. 65.000.000
6. Katombiri, UKM Batik Bulan Batang RP. 46.000.000

Koordinasi terselenggaranya pasar UKM Jateng ke pasar Nasional dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui potensi unggulan Kabupaten/Kota mengenai permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan serta mewujudkan persamaan persepsi/ cara pandang dalam mengimplementasi program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang pasar UKM Jateng ke Pasar Nasional.

a) Permasalahan dan Kendala

Kurangnya UKM yang akan mengakses ke pasar nasional.

b) Antisipasi Pemecahan Masalah

Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, prov, dan kab/kota guna mengetahui potensi unggulan kab/kota yang akan menuju ke pasar Nasional.

Terselenggaranya Fasilitas pameran UKM ditingkat Nasional dan regional dan monitoring perkembangan UKM pasca pameran Terselenggaranya monitoring dan perkembangan UKM pasca pameran inacrafty 12 Kab/Kota Semarang. Keikutsertaan pada Pameran yang dilaksanakan dalam rangka mengkoordinir dan terfasilitasinya kegiatan pameran yang diikuti oleh SKPD Provinsi, Kabupaten /Kota untuk memperkenalkan produk unggulan. Pameran yang diikuti antara lain :

- 1) Pameran Inacraft
- 2) Pameran PRJ
- 3) Pameran Jateng Fair
- 4) Java Expo
- 5) Fashion and Craft
- 6) Pameran Indocraft
- 7) Katumbiri Expo

Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan instansi terkait Provinsi Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan Instansi Terkait Provinsi Terlaksananya rapat pengembangan koperasi dan UMKM dengan SKPD/Instansi terkait 8 Kali, koordinasi pengembangan koperasi dan UMKM dengan SKPD terkait Prov. Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan instansi terkait Provinsi dilaksanakan guna mensinkronkan dan menyelaraskan kegiatan bidang pengembangan Koperasi dan UMKM dengan SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1) Permasalahan dan Kendala

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sementara waktu dimoratorium untuk diperbaiki skem kreditnya;

2) Antisipasi Pemecahan Masalah

Skim – skim kredit usaha produktif dapat dikembangkan di Jateng, diharapkan KUR dapat segera diaktifkan kembali karena terbukti sangat membantu pelaku usaha yang belum *bankable* namun sudah *feasible*.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Koperasi dan UMKM di 35 Kab/Kota dilaksanakan dalam rangka untuk mensinkronkan program program pengembangan Koperasi dan UMKM serta penyaluran KUR di Jawa Tengah agar selaras dengan Program-Program dari Pusat.

Terlaksananya Rakor Program Pembiayaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Terselenggaranya rakor pembiayaan dan kemitraan koperasi dan UMKM3 kali, Program pembiayaan dan kemitraan koperasi di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah

Rakor Program Pembiayaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka terkoordinasinya rencana penyaluran KUR, dan PKBL BUMN di Jawa Tengah

1) Permasalahan dan Kendala

a) Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usahanya adalah terbatasnya akses untuk mendapatkan tambahan pembiayaan dari sektor perbankan;

b) Basis data *by name by address* UMKM di Jawa Tengah yang akan di upload ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) belum tersedia sehingga belum dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mensyaratkan dibangunnya basis data UMKM secara lengkap, sementara ini masih menggunakan cara lama dalam menyalurkan KUR yaitu perbankan secara aktif mencari nasabah ke masyarakat belum melalui SIKP.

c) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga pemantauan KUR belum berjalan optimal.

d) Keterbatasan personil di masing- masing Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan kepada UMKM di Jawa Tengah

2) Antisipasi Pemecahan Masalah

a) Menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

- b) Mendorong pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dgn Pemerintah Pusat dan koordinasi dgn Provinsi lain terkait pengembangan Koperasi dan UMKM. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam rangka untuk mensinkronkan program pengembangan Koperasi dan UMKM serta penyaluran KUR di Jawa Tengah agar selaras dengan Program-Program dari Pusat.

Berdasarkan tabel- tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM dapat dikategorikan baik dengan indikator target dan realisasi mencapai 100 %.

1) Permasalahan dan Kendala

Belum sinkronnya program pengembangan Koperasi dan UMKM serta penyaluran KUR di Jawa Tengah agar selaras dengan Program-Program dari Pusat.

2) Antisipasi Pemecahan Masalah

Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan SKPD terkait secara kontinyu.

Hasil :

- 1) Jumlah usaha Mikro Kecil yang telah mengajukan izin usaha mikro dan kecil per Desember 20105 total sebanyak 27.759 UMK;
- 2) Jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah yang semula tahun 2015 berjumlah 140 OVOP;
- 3) Penyaluran program KUR pada 30 Juni 2016 dicapai oleh Pemprov Jateng sebesar Rp. 9,1 Triliyun kepada 482.336 UMKM.

Indikator Sasaran 4.1.3 tercapai sebesar 100% dari target direncanakan atau pencapaian sama dengan Tahun sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Indikator sasaran pembinaan BUMD bidang jasa keuangan Jasa Produksi terdiri dari beberapa kegiatan sebagai pendukung. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai target dan tidak terjadi hambatan yang cukup mengganggu terlaksananya target kinerja. Kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan UPS BUMD Jasa Produksi dengan target terlaksananya kegiatan UPS BUMD Jasa Produksi dilaksanakan Februari s/d Desember 2018, dipimpin oleh Bapak Gubernur / Kuasa-nya (untuk BUMD) atau Kementerian BUMN (untuk BUMN), bertempat di Kantor Gubernur, Kantor Pusat BUMD/BUMN, atau di Jakarta, dengan hasil terlaksananya fasilitasi RUPS perhitungan deviden dan hasil usaha Tahun 2018, RUPS pengesahan RKAP tahun 2017 serta RUPS LB.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi di BUMD/BUMN dilaksanakan untuk memberikan persetujuan pengesahan

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), hasil usaha, pembagian deviden, serta masalah – masalah lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Permasalahan dan Kendala.

Penghitungan hasil usaha berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik pada masing-masing unit BUMD/BUMN beberapa kali mundur dari jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penjadwalan pelaksanaan RUPS menjadi mundur juga.

b. Antisipasi Pemecahan Masalah

Koordinasi lebih intensif guna merencanakan RUPS yang perlu segera.

Penyelenggaraan Rakor dan FGD dilaksanakan guna menyatukan visi pengelola BUMD terhadap permasalahan tertentu sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap hal-hal tertentu

3. Penyusunan Pergub Konsolidasi PD BKK se- jateng Ditetapkannya Pergub Konsolidasi PD BKK se- jateng Dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Juli 2018 di Hotel Amantis Kab.Demak, dengan Peserta : Biro Perekonomian, Biro Hukum, Bagian Perekonomian Kab/Kota se-Jateng, Direksi PD BKK se-Jateng. Hasil kegiatan berupa finalisasi rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Konsolidasi dan Pengelolaan PD BKK Jawa Tengah.
4. Terselenggaranya penyusunan Pergub Jateng No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Konsolidasi dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
5. Kegiatan Desk Penghitungan Hasil Usaha PD BPR BKK/BKK Dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 Maret 2018 di Kab. Tegal dengan peserta Pemegang Saham dan Direksi PD BPR BKK dan PD BKK se Jateng. Penghitungan hasil usaha didasarkan pada hasil audit laporan keuangan tahun 2017.
6. Desk penghitungan hasil usaha PD BPR BKK dan PD BKK se-Jateng berdasarkan hasil audit Akuntan Publik, dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil penghitungan deviden lebih akurat. Terlaksannya Evaluasi Triwulan PD BPR BKK/BKK Penyusunan RKAP 2017.
7. Kegiatan Pembinaan, Evaluasi Lapangan, Tamades PD BPR BKK/BKK Pembinaan, Evaluasi Lapangan, dan menghadiri Undian Tamades PD BPR BKK dan PD BKK dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota pada bulan Januari s/d Desember 2018.
8. Pembinaan dan evaluasi lapangan PD BPR BKK dan PD BKK dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan membantu upaya penyelesaiannya, memantau kinerja keuangan secara berkala, meningkatkan sinergi dan strategi guna meningkatkan kinerja PD BPR BKK dan PD BKK.
9. RUPS PD BPR BKK dan BKK, Terselenggaranya RUPS PD BPR BKK dan BKK
 - a. RUPS-LB diselenggarakan setiap bulan dengan didasarkan atas usulan dari Pemegang Saham atau Direksi PD BPR BKK/PD BKK.
 - b. RUPS Tahunan dengan agenda penghitungan hasil usaha dan pembagian deviden dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2018 di Gradhika Bhakti Praja.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD BPR BKK dan PD BKK sebagai kekuasaan tertinggi di lembaga tersebut dilaksanakan untuk memberikan persetujuan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), hasil usaha, pembagian deviden, serta masalah – masalah lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kegiatan fasilitasi revitalisasi BUMD Realisasi : pendampingan pada BUMD sebagai bahan masukan kepada Bapak Gubernur Jateng dalam menetapkan kebijakan BUMD Prov.Jateng (Laporan tersendiri dari Tim Revitalisasi BUMD Prov.jateng). Revitalisasi BUMD dilaksanakan oleh Tim Revitalisasi BUMD yang dibentuk oleh Gubernur, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja BUMD. Selain itu im juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap kebijakan pengembangan BUMD.
11. Terselenggaranya pendampingan seleksi Pegawai PD BPR BKK Pelaksanaan seleksi pegawai kontrak atau pengangkatan pegawai kontrak menjadi calon pegawai PD BPR BKK dan PD BKK dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2018 bagi PD BPR BKK dan PD BKK yang mengusulkan pengadaan pegawai. Sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PD BPR BKK dan PD BKK, seleksi pegawai di PD BPR BKK dan PD BKK harus melibatkan unsur Pemegang Saham baik Pemprov maupun Pemkab/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PD BPR BKK dan PD BKK, usulan penghapusbukuan kredit macet PD BPR BKK dan PD BKK harus diverifikasi oleh tim dari pemegang saham (Pemprov maupun Pemkab/Kota) sebelum diajukan persetujuan dalam RUPS.

Indikator Sasaran 4.1.4 tercapai sebesar 100% dari target direncanakan atau pencapaian sama dengan Tahun sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Indikator sasaran ini memiliki target terlaksananya Pembinaan dan Monev. BUMD Jasa & Produksi didukung oleh kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- 1.Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Unit Usaha PD CMJT pada bulan Februari 2018 dan triwulan III tahun 2018 pada bulan November 2018, di Kab. Semarang, Kota Semarang, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Surakarta, Rembang, Tegal, dan Cilacap. Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2015 di unit-unit usaha PT. SPJT, dilaksanakan bulan September 2018
 - 2.Fasilitasi pembinaan dan monitoring evaluasi BUMD/BUMN dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan membantu upaya penyelesaiannya, memantau kinerja keuangan secara berkala, serta meningkatkan sinergi dan strategi guna meningkatkan kinerja BUMD/BUMN secara keseluruhan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan serta kontribusi terhadap PAD Jawa Tengah.
- Permasalahan dan Kendala
- Kesulitan BUMD dalam mengembangkan bisnisnya terkendala dengan adanya kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan, peralatan yang tidak

memadai (tua), core bisnis yang belum jelas dan masing-masing BUMD yang belum bersinergi secara optimal. Dan belum optimalnya penerimaan PAD dari Deviden BUMD.

Antisipasi Pemecahan Masalah

Perlunya pembinaan yang lebih intensif kepada kinerja BUMD sehingga dapat mengoptimalkan Deviden.

3. Koordinasi BUMD ke luar Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap, wawasan yang lebih luas, serta acuan yang lebih detail mengenai BUMD di Provinsi lain, maupun pengelolaan BUMD di Provinsi lain, untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan BUMD di Jawa Tengah.

Indikator sasaran 4.1.5 tercapai sebesar 100% dari target direncanakan atau pencapaian sama dengan Tahun sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Target kinerja indikator sasaran ini adalah Memfasilitasi dan mengkoordinasikan bidang perhubungan (moda jalan raya, jalan rel, laut dan udara), untuk menciptakan infrastruktur yang handal dan transportasi yang aman, selamat, tertib, teratur, efektif, efisien dan terpadu (intra dan antar moda) guna mendorong perekonomian. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Pengukuran ke tiga sasaran tersebut tercermin pada target-target tersebut di bawah :

1. Fasilitasi dan koordinasi bidang perhubungan dilaksanakan guna sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Perhubungan yang meliputi transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai danau dan penyeberangan, laut dan udara serta komunikasi dan informatika, agar memiliki daya guna dan hasil guna yang maksimal dan memenuhi aspek hukum, administratif dan teknis.
2. Koordinasi penyelenggaraan Posko Terpadu dilaksanakan dalam rangka untuk mengkoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat baik menjelang, pada saat dan pasca lebaran, natal & tahun baru agar berjalan dengan optimal sesuai yang diharapkan, terutama terkait pelayanan transportasi, pemenuhan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, penanganan tanggap darurat bencana, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indikator sasaran 4.1.6 tercapai sebesar 100% dari target direncanakan atau pencapaian sama dengan Tahun sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Target kinerja indikator ini adaah pembinaan urusan pariwisata lintas provinsi. Target kinerja ini didukung oleh kegiatan :

1. Fasilitasi dan koordinasi pemasaran UKM bidang pariwisata dilaksanakan dalam rangka terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan pameran pariwisata yang diikuti oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk

memperkenalkan potensi unggulan dibidang pariwisata. Pameran yang diikuti antara lain Pameran Gebyar Wisata Nusantara dan Pameran Adiwastra. Terselenggaranya 2 pameran (Adiwastera Nusantara dan Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara) di JCC Jakarta.

2. Koordinasi pengembangan bidang Pariwisata dilaksanakan guna sinkronisasi dan penyelarasan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Pariwisata yang meliputi Rakor di 3 Bakorwil.

- 1) Permasalahan dan Kendala

Masih dirasakan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai pada daerah tujuan wisata

- 2) Antisipasi Pemecahan Masalah

Meningkatkan kualitas insfrastruktur pariwisata.

TUJUAN – 5 : MENGOPTIMALKAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN.

Tujuan kelima dicapai dengan melaksanakan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 5.1 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			Capaian s/d Th. 2018 (%)	% Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
		Targ et	Real isasi	Capa ian (%)		
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur,	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	5	100	100	100
	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	5	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			Capaian s/d Th. 2018 (%)	% Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	5	100	100	100
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	5	100	100	100
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	5	100	100	100
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	9	9	100	100	100
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	5	100	100	100

Secara umum capaian seluruh besar indikator pada sasaran **“Meningkatnya Keterpaduan dan Tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian”** pada tahun 2018 **terrealisasi 100%** atau **kategori sangat baik**. Capaian sasaran ini tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan **indikator sasaran baru** hasil dari Renstra Perubahan Tahun 2013-2018. Apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra perubahan Tahun 2013-2018 target kinerja ini akan tercapai sesuai dengan rencana. Sasaran 5.1 diukur dengan indicator kinerja sebagai berikut :

Indikator sasaran 5.1.1. “Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang” pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang**. Kegiatan sebagaimana tersebut memfasilitasi rakor dan sinkronisasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, FGD pengelolaan sumber daya air,

FGD kebijakan bidang PU dan Tata Ruang, Rakor pengelolaan sumber daya air, Rakor kebijakan bidang PU dan tata ruang, fasilitasi hari air sedunia, fasilitasi konferensi sungai serta koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.



Gambar 3.1 Fasilitasi Konferensi Sungai



Gambar 3.2 FGD dan Rakor Pengelolaan Sumber Daya Air





Gambar 3.3 FGD dan Rakor serta pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang PU dan Tata Ruang



Gambar 3.4 Fasilitas Hari Air Dunia

Indikator sasaran 5.1.2 “Koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**. Kegiatan tersebut memfasilitasi FGD bidang perumahan dan kawasan permukiman, FGD lingkungan berkualitas, Rakor lingkungan berkualitas, Rakor bidang perumahan tingkat Provinsi Jawa Tengah, Rakor kawasan permukiman tingkat Provinsi Jawa Tengah serta monitoring bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.



Gambar 3.5 Rakor Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Gambar 3.6 FGD dan Rakor Lingkungan Berkualitas

Indikator sasaran 5.1.3 “Koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan**

Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Kegiatan tersebut memfasilitasi rakor urusan lingkungan hidup, rakor pengembangan kehutanan, rakor bidang konservasi tanah dan air, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH, kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, fasilitasi peringatan hari penting LHK, fasilitasi pameran bidang kehutanan, fasilitasi KKMD Prov. Jawa Tengah, terlaksananya penyusunan kebijakan bidang LHK.



Gambar 3.7 Peringatan Hari Lingkungan Hidup



Gambar 3.8 Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia



Gambar 3.9 Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Berlatar Belakang Lahan dan Kehutanan



Gambar 3.10 Rakor Pemanfaatan Kawasan Hutan



Gambar 3.11 Fasilitas Pameran Bidang Kehutanan



Gambar 3.12 Rakor Penyelamatan Danau Prioritas (Rawa Pening)

Indikator sasaran 5.1.4 “Koordinasi Pengelolaan Pembangunan ESDM” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral**. Kegiatan tersebut memfasilitasi terselenggaranya rakor kebijakan bidang ESDM dan teridentifikasinya permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor kegiatan ESDM dan teridentifikasinya permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor pendayagunaan energi.



Gambar 3.13 Rakor Sinergitas Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)



Gambar 3.14 Monev Bidang Energi



Gambar 3.15 Rakor Ketenagalistrikan Dan Peningkatan Elektrifikasi di Jawa Tengah



Gambar 3.16 Rakor Pengelolaan Pertambangan Di Jawa Tengah



Gambar 3.17 Rakor Penghematan Energi Dan Air

Indikator sasaran 5.1.5 “Koordinasi Pengelolaan, Pengendalian Ketahanan Pangan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Pembangunan Ketahanan Pangan**. Kegiatan tersebut memfasilitasi koordinasi pembangunan ketahanan pangan, koordinasi stabilisasi komoditas pangan strategis, fasilitasi pemberdayaan masyarakat hutan untuk peningkatan ketahanan pangan serta fasilitasi penyusunan pergub perencanaan pembangunan pertanian Jawa Tengah.



Gambar 3.18 Rakor Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan



Gambar 3.19 Rakor Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesantren



Gambar 3.20 Rapat Pergub Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani

Indikator sasaran 5.1.6 “Koordinasi Pengelolaan, Pengendalian Kelautan Dan Perikanan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan**. Kegiatan tersebut memfasilitasi koordinasi pengembangan usaha dan produksi perikanan tangkap sumberdaya kelautan, koordinasi pengembangan usaha dan produksi perikanan budidaya, koordinasi pembangunan usaha dan produksi garam rakyat dan koordinasi pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Gambar 3.21 Koordinasi Perikanan Tangkap Jawa Tengah



Gambar 3.22 Rapat Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Terintegrasi Sistem OSS (Online Single Submission) di Jawa Tengah



Gambar 3.23 Rakor Garam Beryodium



Gambar 3.24 Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya

Indikator sasaran 5.1.7 “Koordinasi Pengelolaan, Pengendalian Pertanian, Perkebunan, Peternakan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.** Kegiatan tersebut memfasilitasi rakor peningkatan produksi peternakan, sewa stand pameran pembangunan pertanian, rakor penyaluran pupuk bersubsidi (KP3), rakor pengembangan Kartu Tani, rakor evaluasi Kartu Tani, rakor pengembangan pupuk organik, rakor pembinaan kelembagaan pertanian, rakor penyusunan Perda bidang pertanian perkebunan di Jawa Tengah, dan rakor peningkatan produksi pertanian di Jawa Tengah.



Gambar 3.25 Rakor Pengembangan dan Evaluasi Kartu Tani



Gambar 3.26 Pameran Pembangunan Pertanian



Gambar 3.26 Pameran Pembangunan Pertanian (Lanjutan)

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 5.859.866.400 ,- atau 96,42 % dari total pagu sebesar Rp.6.077.500.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan 2 Program Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alama dengan 9 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan;
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
3. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, perkebunan dan Peternakan;
4. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
6. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor;
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di Luar Daerah

TUJUAN - 6 : MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PENGENDALIAN SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, sasarannya adalah :

Sasaran : 6.1 Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.

Sasaran Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran 6.1 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-1, sbb :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Presentase SKPD dengan ketepatan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	80 %	80 %	100	115.94	192.39 %
	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Difasilitasi Melalui ULP Provinsi Jawa Tengah	350 paket	817 paket	233	152	1732 paket
	Tercapainya Kesesuaian Antara Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Keg. APBD Prov. Jateng;	48 OPD	48 OPD	100	-	-
	Termonitornya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng; dan Terkendalinya Pelaksanaan APBD Prov. Jateng	35kab/kota	35 kab/kota	100	-	-

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 6.1 "Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah." dapat **dicapai melebihi dengan target**. Untuk capaian kinerja indikator

Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi melalui ULP Prov. Jateng tercapai 233 %, ditargetkan 350 paket tercapai 817 paket.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis 6.1 Tahun 2018 didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan SKPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6.1, adalah sebesar Rp 6.150.000.000,- atau 63.08% dari total pagu sebesar Rp 9.750.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 6.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jateng
3. Kegiatan Sinergitas TEPPRA Provinsi Jateng dan Kab/Kota

Sasaran 6.2 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.

Secara umum sasaran tersebut telah tercapai 100% atau sesuai target yang ditetapkan, sasaran ini sama dengan pencapaian Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah.	Progres Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota sesuai target	a. 80%	80 %	100%	97.40%	98.70 %
	Persentase Terfasilitasinya Usulan Sinergitas Pembangunan di Daerah dari Kab/Kota	b. 80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Alat Tulis Kantor Biro Adm. Bangda	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Baik Luar maupun Dalam	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
	Daerah pada Biro Adm. Bangda					

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 6.2 “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah” **dapat dicapai sesuai dengan target.**

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis II Tahun 2018 ini didukung dengan melakukan pemantauan (monitoring) ke kab/kota sehingga bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selanjutnya ada penekanan kebijakan yang relevan dari Provinsi terkait pelaksanaan bantuan keuangan agar bisa berjalan dengan maksimal.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6.2, adalah sebesar Rp 1.515.000.000,- atau 15.54 % dari total pagu **sebesar** Rp 9.750.000.000,-.

Pencapaian sasaran 6.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
2. Kegiatan Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur kab/kota
3. Kegiatan Penyediaan ATK
4. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi di dalam dan luar daerah

Sasaran 6.3 : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis	'Presentase SKPD dan Kabupaten/ Kota yang Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan	87.89 % 80 %	94.08% 80 %	107.04% 100	94.08% 100	94.06%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	% Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018)
pelaksanaan pembangunan.	Keuangannya Tepat Waktu					
	Jumlah draft set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng 2018	100 buku	100 buku	100	100 buku	500 set
	Persentase efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima	84 %	84%	100	100%	108.70
	Jumlah Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 6.3 “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan” dapat **dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.**

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis 6.3 Tahun 2018 didukung oleh koordinasi yang intensif dengan SKPD dan sistem pelaporan efektif efisien agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6.3, adalah sebesar Rp 2.085.000.000,- atau 21.38% dari total pagu sebesar Rp 9.750.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Analisis Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
2. Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng
3. Kegiatan Pemantauan dan Pemanfaatan Evaluasi DAK di Jateng
4. Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset.

TUJUAN - 7 : MENGOPTIMALKAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN PROGRAM DAN FASILITASI ADMINISTRASI KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Tujuan 7 sebagaimana tersebut dicapai dengan pencapaian sasaran :

Sasaran 7.1 : Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis terdiri dari 9 (sembilan) indikator yaitu :

1. Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan.
4. Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik.
5. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM.
6. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO.
7. Prosentase OPD yang SAKIP nya baik.
8. Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya.
9. Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

No.	Indikator Kinerja	Real. 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1.	Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	75%	80%	80%	100%	80%	100%
2.	Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran.	28	31	31	100%	31	100%
3.	Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan.	75%	90%	90%	100%	90%	100%

4.	Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik.	55%	60%	60%	100%	60%	100%
5.	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM.	24 UPP	28 UPP	60 UPP	214,28%	28 UPP	214,28%
6.	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO.	31 UPP	34 UPP	34 UPP	100%	34 UPP	100%
7.	Prosentase OPD yang SAKIP nya baik.	85,42%	90%	100%	111,11%	90%	111,11%
8.	Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya.	100%	30%	30%	100%	30%	100%
9.	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis							113,57%

Indikator kinerja sasaran 7.1.1

Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 80% terealisasi sebesar 80%. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 5% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung**



Gambar 3.1 Rakor Pengendalian Penyelenggaraan Cabang Dinas

pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini sebesar Rp 831.559.950,- atau 97,83% dari total pagu sebesar Rp 850.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 18.440.050,- atau 2,17% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sasaran 7.1.2.

Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebanyak 31 Kab./Kota terealisasi sebanyak 31 Kab./Kota. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebanyak 2 Kab./Kota dari target yang telah ditentukan. Sementara



Gambar 3.2 FGD Kelembagaan Perangkat Kab./Kota

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 442.773.505,- atau 98,39% dari total pagu sebesar

Rp 450.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 7.226.495,- atau 1,61% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan



Gambar 3.2 FGD Kelembagaan Perangkat Kab./Kota

Pemerintahan Umum dengan kegiatan Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sasaran 7.1.3.

Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 90% terealisasi sebesar 90%. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 15% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir**



Gambar 3.3 Workshop Penyusunan ABK

Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 690.453.240,- atau 98,64% dari total pagu sebesar Rp 700.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 9.546.760,- atau 1,36% dari pagu yang ditentukan. **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sasaran 7.1.4.

Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 60% terealisasi sebesar 60%. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 5% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 871.521.625,- atau 97,38% dari total pagu sebesar Rp 895.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 23.478.375,- atau 2,62% dari pagu yang ditentukan. **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dibidang Ketatalaksanaan
2. Kegiatan Pengembangan Ketatalaksanaan.

Indikator kinerja sasaran 7.1.5.

Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM tercapai 214,28% atau dengan kategori **Sangat Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebanyak 24 UPP terealisasi sebanyak 60 UPP hal tersebut dapat tercapai dikarenakan dengan adanya perubahan kebijakan untuk mempercepat progres capaian yang pada awalnya hanya difasilitasi Biro Organisasi menjadi dilaksanakan secara mandiri sementara Biro Organisasi hanya melaksanakan asistensi. Target



Gambar 3.5 BinteK Survey Kepuasan Masyarakat

ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebanyak 36 UPP dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 214,28%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 671.616.050,- atau 79,01% dari total pagu sebesar Rp 850.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 178.383.950,- atau 20,99% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kegiatan Fasilitasi dan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Indikator kinerja sasaran 7.1.5.



Gambar 3.4 Bintek Penyusunan Peta Proses Bisnis

Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebanyak 34 UPP terealisasi sebanyak 34 UPP. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebanyak 3 UPP dimana dari target yang telah

ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 588.866.700,- atau 89,89% dari total pagu sebesar Rp 655.100.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 66.233.300,- atau 10,11% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Pendampingan Penerapan SMM dan Sertifikasi ISO.

Indikator kinerja sasaran 7.1.6.

Prosentase OPD yang SAKIP nya baik tercapai 111,11% atau dengan kategori **Sangat Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 90% terealisasi sebesar 100%, hal tersebut tercapai diantaranya dengan adanya komitmen dan pemahaman Kepala Perangkat Daerah dalam manajemen kinerja atau SAKIP semakin meningkat. Target ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 14,58% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan



Gambar 3.7 Fasilitas Penguatan SAKIP

strategis Biro Organisasi telah tercapai 111,11% sehingga sudah melampaui apa yang telah ditargetkan. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 993.550.450,- atau 99,36% dari total pagu sebesar Rp 1.000.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 6.449.550,- atau 0,64% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan SAKIP.
2. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Indikator kinerja sasaran 7.1.6.

Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 30% terealisasi sebesar 30%. Target ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5% dimana dari target

yang telah ditentukan. Sementara apabila dibandingkan dengan target



jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 642.782.421,- atau 93,16% dari total pagu sebesar Rp 690.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 47.217.579,- atau 6,84% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja.
2. Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja sasaran 7.1.7.

Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Target ini tidak dapat dibandingkan **dengan Tahun 2017**



Gambar 3.9 Kegiatan Pelayanan Adm. Kepegawaian

dikarenakan indikator ini menggunakan data non kumulatif. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100% ini dikarenakan indikator ini menggunakan data non kumulatif. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja**

ini sebesar Rp 338.314.625,- atau 84,58% dari total pagu sebesar Rp 400.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 61.685.375,- atau 15,42% dari pagu yang ditentukan.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun **Hambatan dan kendala** dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penataan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dicermati dan disesuaikan kembali.
2. Belum adanya pedoman kamus kompetensi teknis dari Kementerian – Kementerian terkait sehingga belum dapat di susun Standar Kompetensi Jabatan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
3. Belum terbitnya beberapa regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Belum terbitnya beberapa regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Rumah Sakit, Kesbangpol, dan BPBD).
5. Ketidaktahuan tentang kebijakan terkait ketatalaksanaan karena kurangnya sosialisasi pada tataran internal Perangkat Daerah.
6. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan terkait ketatalaksanaan sehingga pada tataran implementasi menjadi tidak sesuai.
7. Mind set pegawai maupun Perangkat Daerah yang menganggap bahwa norma, standar, petunjuk dan ketentuan bukan hal krusial yang wajib dilaksanakan.
8. Banyaknya kebijakan yang sejenis yang diatur oleh lembaga/kementerian sehingga pada tataran implementasi menjadi membingungkan.
9. Pejabat pengampu ketatalaksanaan pada Perangkat Daerah (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) tidak mengawal secara intens.
10. Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam memasukkan data capaian kinerja kedalam aplikasi E-SAKIP.
11. Pengumpulan capaian data kinerja RPJMD Perangkat Daerah masih kurang tepat waktu.
12. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti Surat Edaran atau hasil Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja.
13. Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2013 – 2023 belum jelas target dan indikator capainnya.

Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala.

1. Melakukan desk penyusunan Peta Jabatan dan formasi pegawai dengan Perangkat Daerah pasca penataan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.
2. Menyusun konsep kamus Kompetensi Teknis di lingkungan Perangkat Daerah dengan melibatkan instansi terkait dan berkerjasama dengan konsultan dan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk di validasi.
3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menertibkan regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Melakukan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan ke Perangkat Daerah, antara lain berupa sosialisasi secara intens dengan tindak lanjut dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada tataran internal Perangkat Daerah.
6. Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penegakan kebijakan pada lingkup tatalaksana (antara lain tidak penggunaan pakaian dinas).
7. Menyampaikan usulan kepada Pusat untuk melakukan proses koordinasi dan sinkronisasi pada saat membuat suatu kebijakan sehingga hanya ada satu kebijakan untuk satu urusan yang sama (kebijakan yang dikeluarkan selaras antara yang satu dengan yang lain).
8. Mendorong Perangkat Daerah dalam pengisian data capaian kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP.

9. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Perangkat Daerah.
10. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2023 dengan target dan indikator capaian yang jelas beserta renaksi sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi.

TUJUAN 8 : MENGOPTIMALKAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, FASILITASI PELAYANAN RUMAH TANGGA SETDA, HUMAS DAN PROTOKOL, KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN :

Tujuan sebagaimana dimaksud dicapai dengan menetapkan sasaran :

Sasaran 8.1 : Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah Dibidang Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Tata Usaha Serta Rumah Tangga Pimpinan.

Hasil pengukuran capain kinerja sasaran 8.1 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggambarkan, ketercapaian sasaran dan tujuan sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian ini sama dengan pencapaian tahun 2017 **sebesar 100%** atau **dikategorikan sangat baik**. Penncapaian dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dalam pencapaian indicator kinerja sasaran sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran 8.1.1.

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja indikator sasaran 1.1, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 8.1.1
Pemenuhan Pelaksanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROSENTASE REALISASI 2017	PROSENTASE REALISASI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan pelaksanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah.				
1	Tersusunnya dokumen standarisasi biaya kegiatan, honorarium, biaya dan harga	1 dokumen	83,10 %	80,27 %	1 dokumen
2	prosentase pemenuhan pengelolaan barang milik daerah	100 %	83,21 %	75,92 %	100 %
3	prosentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumberdaya air, listrik gedung kantor maupun rumah dinas/jabatan	100 %	93,21 %	85,15 %	100 %
4	prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	88,0 %	96,69 %	100 %
5	prosentase pemenuhan kebutuhan asuransi barang milik daerah	100 %	95,90 %	95,15 %	100 %
6	prosentase pemenuhan kebutuhan Penyediaan jasa kebersihan kantor/ rumah tangga dinas	100 %	96,79 %	98,07 %	100 %
7	prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor biro umum	100 %	97,57 %	99,76 %	100 %
8	prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan biro umum	100 %	98,42 %	98,15 %	100 %
9	prosentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	99,17 %	100 %
10	prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga biro umum	100 %	98,55 %	97,88 %	100 %
11	prosentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman biro umum	100 %	99,98 %	99,75%	100 %
12	prosentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah biro umum	100 %	97,17 %	84,24%	100 %
13	prosentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan perkantoran	100 %	94,97 %	96,29%	100 %
14	Prosentase pelaksanaan olah raga dan seni biro umum	100 %	89,64 %	90,87%	100 %
15	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin rumah jabatan/berkala rumah jabatan	100 %	93,70 %	92,44%	100 %
16	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	100 %	96,81 %	94,72%	100 %
17	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor biro umum	100 %	94,96 %	93,96%	100 %
18	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	92,86 %	95,83%	100 %
19	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	100 %	93,82 %	94,13%	100 %
20	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala meubelair biro umum	100 %	87,76 %	99,91%	100 %
21	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga	100 %	74,05 %	88,28%	100 %
22	prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	92,75 %	96,75%	100 %
23	prosentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	51,19 %	91,60%	100 %
24	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan	100	-	99,23%	100 %

	Dinas/Operasional	%			

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 8.1.1, Terpenuhinya pelaksanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah, dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2018 tercapai sebesar 93,51%, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata realisasi anggaran tercapai sebesar 91,06%. Dengan di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
3. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
12. Kegiatan Peningkatan Olah Raga dan Seni

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
9. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan

Harga

2. Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah

Sedangkan anggaran dan realisasi pendukung indikator sasaran 1.1 pencapaian program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Sebesar **Rp 32.500.000.000,-** untuk **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 30.458.825.058,-** atau tercapai 93,72%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.041.174.942,- atau 6,28% .

Sebesar **Rp. 52.806.000.000,-**, untuk **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** namun dalam realisasinya anggaran terserap sebesar **Rp. 50.670.228.445,-**, atau tercapai 95,96%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.135.771.555,- atau 4,04% .

Sebesar **Rp 390.000.000,-** untuk **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 357.230.000,-** atau tercapai 91,60%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 32.770.000,- atau 8,40% .

Sebesar **Rp 800.000.000,-** untuk **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 624.771.345,-** atau tercapai 78,10%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 175.228.655,- atau 21,90% .

Indikator Sasaran 8.1.2

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja indikator sasaran 1.2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-3
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.2
Pemenuhan Rumah Tangga Pimpinan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROSENTASE REALISASI 2017	PROSENTASE REALISASI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Rumah Tangga Pimpinan.				
1	prosentase pemenuhan kegiatan sinkronisasi program dan pengendalian kebijakan kepala daerah	100 %	96,52 %	81,26%	100 %

2	prosentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	100 %	92,49 %	43,00%	100 %
3	prosentase pemenuhan kebutuhan rakor perencanaan program	100 %	77,85 %	96,02%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.2			88,95 %	73,43%	100 %

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.2, Terpenuhinya Rumah Tangga Pimpinan, realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 73,43 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, realisasinya sebesar 88,95 %, yang didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Sebesar **Rp. 150.000.000,-**, untuk **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** namun dalam realisasinya anggaran terserap sebesar **Rp. 117.517.500,-**, atau tercapai 78,35%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 32.482.500,- atau 21,66% .

Sebesar **Rp. 1.650.000.000,-** , untuk **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** namun dalam realisasinya anggaran terserap sebesar **Rp. 1.340.812.961,-**, atau tercapai 81,26%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.135.771.555,- atau 18,74% .

Indikator Sasaran 1.3

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran 1.3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-4
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.3

Pemenuhan Pelayanan Acara Resmi Penerimaan Tamu Pimpinan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROSENTASE REALISASI 2017	PROSENTASE REALISASI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan pelayanan acara resmi penerimaan				

	tamu pimpinan				
1	prosentase pemenuhan kebutuhan keprotokolan	100 %	98,23 %	92,99%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.3			98,23 %	92,99%	100 %

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.3, Terpenuhinya pelayanan acara resmi penerimaan tamu pimpinan, dengan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 92,99%, apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2017, realisasinya sebesar 98,23%. Dengan didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Biro Umum

Sedangkan anggaran pendukung Indikator sasaran 1.3 pencapaian program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp 1.820.000.000,-** untuk **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 1.692.423.194,-** atau tercapai 92,99%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 127.576.806,- atau 7,01%.

Indikator Sasaran 1.4

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja indikator sasaran 1.4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-5
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.4
Pemenuhan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan setda.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROSENTASE REALISASI 2017	PROSENTASE REALISASI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan setda.				
1	prosentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat biro umum	100 %	94,97 %	99,96 %	100 %
2	prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	100 %	99,22 %	55,22 %	100 %
3	prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala arsip biro umum	100 %	98,50 %	94,10 %	100 %
4	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan	100 %	-	83,23%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.4			92,29 %	83,13 %	100 %

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.4, Terpenuhinya surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Setda untuk rata-rata realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 83,13%, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata realisasinya sebesar 92,29%, yang didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan

Sebesar **Rp 385.000.000,-** untuk **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 263.689.000,-** atau tercapai 68,49%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 121.311.000,- atau 31,51% .

Sebesar **Rp. 150.000.000,-** , untuk **Program Sarana dan Prasarana Aparatur** namun dalam realisasinya anggaran terserap sebesar **Rp. 138.452.000,-**, atau tercapai 92,30%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 11.548.500,- atau 7,70% .

Sebesar **Rp. 25.000.000,-** , untuk **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan** namun dalam realisasinya anggaran terserap sebesar Rp. 20.808.000,-, atau tercapai 83,23%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.192.000,- atau 16,77% .

Indikator Sasaran 1.5

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja indikator sasaran 1.5, Indikator kinerja, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.5

Pemenuhan Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi Pimpinan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROSENTASE REALISASI 2017	PROSENTASE REALISASI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Hubungan masyarakat dan				

	dokumentasi pimpinan				
1	prosentase pemenuhan kebutuhan kegiatan pimpinan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	99,21 %	99,74%	100 %
2	Prosentase terlaksananya kegiatan penguatan semangat kebangsaan dan cinta tanah air	100 %	74,23 %	89,88%	100 %
3	Terlaksananya kegiatan peningkatan semangat nilai-nilai nasionalisme masyarakat jawa tengah	100 %	75,14 %	94,38%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.5			82,86 %	94,67%	100 %

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.4, Terpenuhinya surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Setda untuk rata-rata realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 94,67%, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata realisasinya sebesar 82,86 %, yang didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah

Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sedangkan anggaran pendukung sasaran 1.4 pencapaian program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp 3.360.000.000,-** untuk **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 3.318.815.624,-** atau tercapai 98,77%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 41.184.376,- atau 1,23%.

Indikator Sasaran 1.6

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja indikator sasaran 1.6, Indikator kinerja, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-7
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.6

Pemenuhan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROSENTASE REALISASI 2017	PROSENTASE REALISASI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6

	Pemenuhan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur				
1	prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah tangga pimpinan	100 %	82,90 %	76,46%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.6			82,90 %	76,46%	100 %

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.6, Terpenuhinya surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Setda untuk rata-rata realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 76,46%, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata realisasinya sebesar 82,90%, yang didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan

Sedangkan anggaran pendukung indikator sasaran 1.6 pencapaian program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp 5.205.000.000,-** untuk **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 3.979.979.612,-** atau tercapai 76,46%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.225.020.388,- atau 23,54% .

Indikator Sasaran 1.7

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja idnikator sasaran 1.7, Indikator kinerja, target, dan realisasinya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-8
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.7

Pemenuhan penyusunan materi naskah pimpinan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET 2018	REALISAS I 2017	PREALISA SI 2018	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan penyusunan materi naskah pimpinan.				
1	prosentase pemenuhan kebutuhan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jateng	100 %	83,10 %	98,68%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.6			83,10 %	98,68%	100 %

Capaian Kinerja Sasaran 1.6, Terpenuhinya surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Setda untuk rata-rata realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 98,68%, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata realisasinya sebesar

83,10%, yang didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah

Sedangkan anggaran pendukung sasaran 1.6 pencapaian program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp 450.000.000,-** untuk **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar **Rp. 444.051.988,-** atau tercapai 98,68%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.948.012,- atau 1,32%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Penunjang sasaran 8.1 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2018 mengelola sumberdaya keuangan, yaitu :

Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Pada tahun 2018 upaya pencapaian sasaran 8.1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp.253.452.354.000,- meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.93.633.104.000,- dengan realisasi Rp 86.400.479.652,- atau 92,28% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 159.819.250.000,- dan terealisasi Rp. 150.691.842.306,- atau 94.29%.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 37 Kegiatan yang tercakup dalam 6 Program sebagaimana diuraikan di atas.

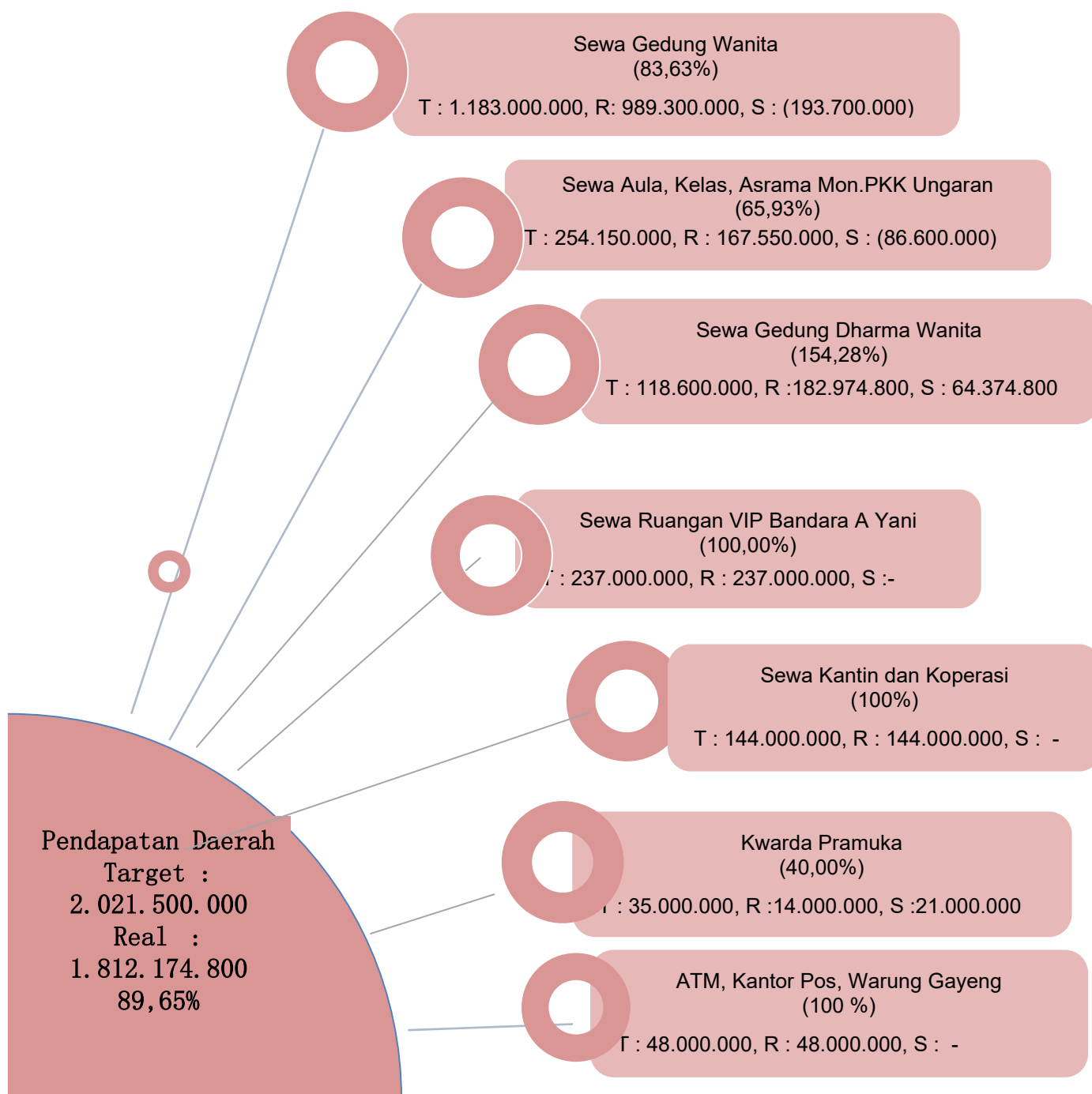
Target Pendapatan

Pada tahun 2018, Sasaran 8.1 disertai target pendapatan yang ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.021.500.000,- (Dua milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Retribusi Jasa usaha hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah, Dari target tersebut pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.812.174.800,- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau dicapai sebesar 89,65%.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Net Map berikut ini :

Net Map

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018



Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan Tahun 2018 tergolong **Baik** (89.65%), Capaian terendah diperoleh dari Retribusi Kwarda Pramuka Jateng sebesar 40,00 %. Pengelolaan sepenuhnya oleh kwarda Jateng dan Biro umum hanya melakukan pencatatan sehingga optimalisasi pendapatan dari obyek retribusi tersebut kurang optimal.

Capaian tertinggi diperoleh dari Obyek Retribusi Gedung Dharma Wanita yaitu Realisasi sebesar 154,28 % dari target.

Apabila dibandingkan Tahun 2017 dengan 2018, dengan melihat tabel tersebut maka dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan terhadap target Tahun 2018 mengalami penurunan 2,56 %.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Secara umum kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat dikategorikan *Sangat Baik*, karena seluruh capaian sasaran kinerja adalah 100%. Namun demikian masih terdapat beberapa *performance gap* yang terjadi pada tahun 2018, yaitu masih ada indikator kinerja yang belum berbasis outcome dan kegiatan yang secara substansi belum sesuai tugas dan fungsi. Namun semua masalah tersebut telah dapat di atasi dengan renstra Setda yang baru 2018-2023.

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis RENSTRA Perubahan Setda Tahun 2013-2018 tersebut di atas, capaian kinerja dalam kategori **Sangat Baik** dengan rincian sebagai berikut :

sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian
1.1	8 indikator sasaran	Sangat Baik
2.1	7 indikator sasaran	Sangat Baik
3.1	8 indikator sasaran	Sangat Baik
4.1	6 indikator sasaran	Sangat Baik
5.1	7 indikator sasaran	Sangat Baik
6.1	7 indikator sasaran	Sangat Baik
7.1	9 indikator sasaran	Sangat Baik
8.1	7 indikator sasaran	Sangat Baik



Sedangkan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018, apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 100% atau **dapat terpenuhi pada** akhir RENSTRA Tahun 2018.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAPAIAN KINERJA.

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran **RENSTRA SETDA Perubahan Tahun 2013-2018**, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalisasi pencapaian sasaran strategis dan program pada Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, khusus capaian kinerja yang terkait dengan penanganan isu strategis yaitu :

1. Hasil capaian kinerja sasaran didasarkan pada penilaian indikator kinerja *output*. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dengan cara demikian terdapat kelemahan yaitu indikator kinerja menyesuaikan dengan sasarannya, sehingga kinerja yang dihasilkan rata-rata mencapai 100 % dan secara otomatis belum mengukur kinerja yang sebenarnya.
2. Analisis efektivitas dan efisiensi belum dapat memberikan kemanfaatan hasil karena capaian kinerja didasarkan pada kinerja *output* dan anggaran yang digunakan belum berbasis sasaran tetapi masih berbasis pada program dan kegiatan.
3. Belum maksimalnya Biro-biro dalam fungsi koordinasi kebijakan dalam upaya pencapaian kinerja pemerintah.

C. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

LKj IP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 masih terdapat beberapa kendala dan perlu mendapat perbaikan bersama. Utamanya mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah dengan harapan Sekretariat Daerah akan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dalam membantu



Gubernur dalam pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, administrasi dan mengkoordinasikan perangkat daerah dan Lembaga lain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Semarang, Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Dr.Ir. SRI PURYONO KS.,MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004